

**2017**

**Katalog : 4102002.9420**

**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA  
DAN  
ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN MANUSIA  
KABUPATEN KEEROM**



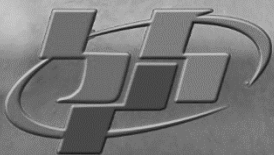
**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN KEEROM**



**2017**

**Katalog : 4102002.9420**

**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA  
DAN  
ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN MANUSIA  
KABUPATEN KEEROM**



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN KEEROM**



**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA  
DAN ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN MANUSIA  
KABUPATEN KEEROM 2017**

*Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017*

Nomor Katalog : 4102002.9420  
Nomor Publikasi : 94200.1815  
Ukuran Buku : 17,60 cm x 25,00 cm  
Jumlah Halaman : xviii + 74 halaman

Naskah :  
BPS Kabupaten Keerom

Gambar Kulit :  
BPS Kabupaten Keerom

Diterbitkan oleh :  
© Badan Pusat Statistik Kabupaten Keerom

Dicetak oleh :  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Keerom

*“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau  
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil  
tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik”*



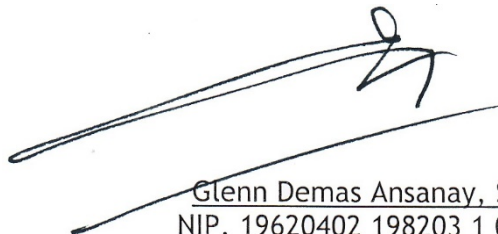
## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Tuhan karena atas limpahan dan Karunia-Nya Publikasi **“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Keerom Tahun 2017”** dapat terselesaikan. Pembuatan publikasi ini merupakan salah satu tindak lanjut dari publikasi sebelumnya, yang memuat indeks komposit pembangunan manusia. Indeks-indeks tersebut memberikan gambaran kuantitatif tentang kebutuhan dan prioritas-prioritas pembangunan manusia.

Dengan adanya informasi ini diharapkan pemerintah daerah dapat melihat apa yang telah sudah dikerjakan, apa yang sedang dikerjakan dalam kaitannya dengan pembangunan di Kabupaten Keerom, selanjutnya membuat perencanaan kebijakan yang tepat terhadap pembangunan manusia di daerah ini untuk pembangunan ke depan. Indikator-indikator yang dimuat ini juga diharapkan berguna bagi para perencana dalam penyusunan program pembangunan manusia dan dipakai sebagai parameter untuk mengevaluasi tahapan-tahapan pembangunan yang dilaksanakan khususnya pembangunan manusia.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu sehingga publikasi ini dapat diterbitkan diucapkan terima kasih. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Arso, November 2018  
Kepala BPS Kabupaten Keerom



Glenn Demas Ansanay, SE  
NIP. 19620402 198203 1 003

<https://keeromkab.bps.go.id>



## ORGANISASI PENULISAN

### ***Penanggung Jawab***

Ka. BPS Kabupaten Keerom

### ***Editor***

Ka. BPS Kabupaten Keerom

### ***Penulis dan Pengolah Data***

Seksi Sosial BPS Kabupaten Keerom

### ***Layout***

Seksi Sosial BPS Kabupaten Keerom

### ***Desain Cover***

Seksi Sosial BPS Kabupaten Keerom

<https://keeromkab.bps.go.id>

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ORGANISASI PENULISAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENJELASAN UMUM</b> .....	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. TUJUAN DAN SASARAN .....	3
1.3. RUANG LINGKUP .....	4
1.3.1. Lingkup Materi .....	4
1.3.2. Lingkup Wilayah .....	4
1.4. ISTILAH-ISTILAH YANG DIGUNAKAN (TERMINOLOGI) ....	5

<b>BAB II DATA DAN METODOLOGI .....</b>	<b>7</b>
2.1. BASIS DATA PEMBANGUNAN MANUSIA .....	7
2.1.1. Sumber Data .....	7
2.1.2. Data Indeks Pembangunan Manusia .....	7
2.2. PENDEKATAN IPM SEBAGAI PENUNJANG PEMBANGUNAN MANUSIA .....	9
2.2.1. Pendekatan Pemanfaatan IPM dalam Pembangunan Manusia .....	9
2.2.2. Konsep Perhitungan IPM .....	13
2.2.3. Tahapan Perhitungan IPM .....	19
<b>BAB III PROFIL KABUPATEN KEEROM .....</b>	<b>25</b>
3.1. Kondisi Geografis .....	25
3.2. Pemerintahan .....	29
3.3. Perekonomian .....	32
3.3.1. Pertanian .....	32
3.3.2. Perdagangan .....	34
3.3.3. Pendapatan Regional .....	35

<b>BAB IV INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN KEEROM ....</b>	<b>39</b>
4.1. SITUASI INDIKATOR-INDIKATOR UTAMA IPM KABUPATEN KEEROM .....	39
4.1.1. Angka Harapan Hidup (AHH) .....	39
4.1.2. Harapan Lama Sekolah (HLS) .....	43
4.1.3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) .....	46
4.1.4. Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan .....	50
4.2. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KABUPATEN KEEROM .....	52
4.3. KECEPATAN IPM .....	54
<b>BAB V ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN KEEROM .....</b>	<b>55</b>
5.1. INDIKATOR KEPENDUDUKAN .....	55
5.1.1. Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga .....	55
5.1.2. Laju Pertumbuhan Penduduk .....	57
5.1.3. Rasio Jenis Kelamin ( <i>Sex Ratio</i> ) .....	58
5.1.4. Rata-rata Anggota Rumah Tangga .....	59
5.2. INDIKATOR PENDIDIKAN .....	59
5.2.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) .....	59

5.2.2.	Harapan Lama Sekolah (HLS) .....	60
5.2.3.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) .....	62
5.2.4.	Tingkat Pendidikan .....	63
5.2.5.	Angka Putus Sekolah (APTS) .....	64
5.3.	INDIKATOR KETENAGAKERJAAN .....	65
5.3.1.	Angkatan Kerja .....	65
5.3.2.	Penduduk Bekerja .....	67
5.4.	INDIKATOR KESEHATAN .....	68
5.4.1.	Angka Morbiditas (AM) .....	68
5.5.	INDIKATOR KONSUMSI .....	69
5.5.1.	Pengeluaran Penduduk Menurut Komoditi .....	69
<b>BAB VI</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
6.1.	KESIMPULAN .....	71
6.2.	SARAN .....	73

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Tabel Maksimum Minimum Indikator IPM .....	20
Tabel 2.2.	Klasifikasi Capaian IPM .....	22
Tabel 4.1.	Perkembangan IPM Kabupaten Keerom Tahun 2015-2017 ...	50

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Ilustrasi Dimensi-dimensi dalam IPM .....	7
Gambar 2.2.	Model Penggunaan Alat Penghubung Input dan Output ..	9
Gambar 2.3.	Pendekatan dari “Atas ke Bawah” ( <i>Top down approach</i> ) .	10
Gambar 2.4.	Pendekatan dari “Bawah ke Atas” ( <i>Bottom-up approach</i> )	11
Gambar 2.5.	Pendekatan Kombinasi Top-down dan Bottom-up ( <i>Hybrid approach</i> ) .....	12
Gambar 2.6.	Ilustrasi Penghitungan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	18
Gambar 2.7.	Ilustrasi Tahapan Penghitungan IPM .....	19
Gambar 2.8.	Rumus Penghitungan Indeks dalam IPM .....	19
Gambar 5.1.	Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Keerom Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2017 .....	58



## DAFTAR GRAFIK

	Halaman.
Grafik 3.1. Persentase Luas Wilayah Kabupaten Keerom Menurut Distrik, 2017 .....	25
Grafik 3.2. Jarak dari Ibukota Distrik ke Kabupaten (km), 2017 .....	26
Grafik 3.3. Jumlah Perangkat Kampung Menurut Distrik, 2017 .....	28
Grafik 3.4. Jumlah Perusahaan Berdasarkan SIUP dan Perusahaan yang Telah Memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Menurut Golongan Permodalan Perusahaan, 2017 .....	33
Grafik 3.5. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Keerom (juta rupiah), 2013-2017 .....	35
Grafik 4.1. Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Keerom, Tahun 2013 – 2017 .....	36
Grafik 4.2. Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, Tahun 2017 .....	38
Grafik 4.3. Pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH) Penduduk Kabupaten Keerom, Tahun 2017 .....	39
Grafik 4.4. Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Keerom, Tahun 2013 – 2017 .....	40

Grafik 4.5.	Harapan Lama Sekolah (HLS) Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, Tahun 2017 .....	42
Grafik 4.6.	Pencapaian Harapan Lama Sekolah (HLS) Penduduk Kabupaten Keerom, Tahun 2017 .....	43
Grafik 4.7.	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Keerom, Tahun 2013 – 2017 .....	44
Grafik 4.8.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, Tahun 2017 .....	45
Grafik 4.9.	Pencapaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Keerom, Tahun 2017 .....	46
Grafik 4.10.	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Keerom, Tahun 2013 – 2017 .....	47
Grafik 4.11.	Pencapaian Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Keerom Tahun 2017 .....	48
Grafik 4.12.	IPM Kabupaten Keerom, Tahun 2017 .....	50
Grafik 4.13.	Pertumbuhan IPM Kabupaten Keerom, Tahun 2013 – 2017	51
Grafik 5.1.	Piramida Penduduk Kabupaten Keerom, Tahun 2017 .....	53
Grafik 5.2.	Penduduk Kabupaten Keerom Menurut Distrik, Tahun 2017.	54
Grafik 5.3.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur Sekolah dan Jenis Kelamin Kabupaten Keerom, Tahun 2017 .	57
Grafik 5.4.	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Keerom Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2017 .....	59

Grafik 5.5.	Sebaran Penduduk Kabupaten Keerom Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan, Tahun 2017 .....	60
Grafik 5.6.	Angka Putus Sekolah (APTS) Kabupaten Keerom Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Sekolah, Tahun 2017 .....	61
Grafik 5.7.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Keerom Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2017 .....	63
Grafik 5.8.	Penduduk Bekerja Menurut Kelompok Umur Kabupaten Keerom, Tahun 2017 .....	64
Grafik 5.9.	Sebaran Lapangan Usaha pada Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Keerom, Tahun 2017 .....	64
Grafik 5.10.	Angka Morbiditas (AM) Kabupaten Keerom Menurut Kelompok Umur, Tahun 2017 .....	66
Grafik 5.11.	Rata-rata Proporsi Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Keerom, Tahun 2017 .....	67

<https://keeromkab.bps.go.id>

## BAB I

### PENJELASAN UMUM

#### 1.1. LATAR BELAKANG

Rancangan pembangunan manusia yang sesungguhnya adalah menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, dan bukan sebagai alat bagi pembangunan. Hal ini berbeda dengan konsep pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia memperkenalkan konsep yang lebih luas dan lebih komprehensif yang mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia di semua golongan masyarakat pada semua tahapan pembangunan. Pembangunan manusia juga merupakan perwujudan tujuan jangka panjang dari suatu masyarakat, dan meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, bukan manusia di sekeliling pembangunan.

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya dan tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana, namun seringkali terlupakan oleh kesibukan jangka pendek yang berorientasi pada hal-hal yang bersifat materi.

Paradigma pembangunan manusia mengandung 4 (empat) komponen utama :

- a. *Produktivitas*. Manusia harus berkemampuan untuk meningkatkan produktifitasnya dan berpartisipasi penuh dalam mencari penghasilan dan

lapangan kerja. Oleh karena itu pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan manusia.

- b. *Pemerataan*. Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan. Sehingga semua orang dapat berpartisipasi dan mendapat keuntungan dari peluang yang sama.
- c. *Keberlanjutan*. Akses terhadap peluang/kesempatan harus tersedia bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Semua sumber daya harus dapat diperbaharui.
- d. *Pemberdayaan*. Semua orang diharapkan berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dalam proses aktifitasnya.

Penyertaan konsep pembangunan manusia dalam kebijakan-kebijakan pembangunan sama sekali tidak berarti meninggalkan berbagai strategi pembangunan terdahulu, antara lain mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan mencegah perusakan lingkungan. Namun, perbedaannya adalah bahwa dari sudut pandang pembangunan manusia, semua tujuan tersebut diatas diletakkan dalam kerangka untuk memperluas pilihan-pilihan bagi manusia.

Agar konsep pembangunan manusia dapat diterjemahkan ke dalam perumusan kebijakan, pembangunan manusia harus dapat diukur dan dipantau dengan mudah. *Human Development Report* (HDR) global telah mengembangkan dan menyempurnakan pengukuran statistik dari pembangunan manusia yaitu berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Adapun komponen-komponen dalam penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meliputi ; Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), Pengetahuan/tingkat pendidikan (*knowledge*) dan Standar Hidup Layak (*decent standard of living*). Untuk memperoleh gambaran tentang pembangunan manusia di Kabupaten Keerom, maka disusunlah publikasi “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Analisis Situasi Pembangunan Manusia (ASPM) Kabupaten Keerom Tahun 2016”, yang diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam penentuan kebijakan pembangunan di Kabupaten Keerom.

## 1.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dari penulisan ini adalah menyajikan data dan informasi tentang kondisi penduduk dan permasalahannya, sebagai dampak dari pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Keerom. Selanjutnya diharapkan dapat menjadi masukan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan sumberdaya manusia di Kabupaten Keerom, termasuk penentuan sektor-sektor prioritas dalam pembangunan manusia.

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini meliputi :

- a. Teridentifikasinya kondisi beberapa variabel sektoral dalam pembangunan manusia, meliputi sektor-sektor: kesehatan, pendidikan dan ekonomi di Kabupaten Keerom;
- b. Memberikan gambaran permasalahan yang ada di bidang pembangunan manusia di Kabupaten Keerom;
- c. Diperolehnya gambaran tentang perkembangan ukuran pembangunan manusia (IPM) dan indikator-indikator sosial lainnya di Kabupaten Keerom;

- d. Terumuskannya implikasi masalah dan kebijakan untuk menangani berbagai masalah yang merupakan bagian dari perencanaan dan penanganan pembangunan manusia di Kabupaten Keerom.

### 1.3. RUANG LINGKUP

#### 1.3.1. Lingkup Materi

Ruang lingkup materi penulisan ini meliputi :

- Identifikasi kondisi variabel kunci dalam pengukuran besaran IPM yang meliputi ; umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent standard of living*).
- Identifikasi permasalahan mendasar pada sektor-sektor kunci yang terkait dengan IPM, meliputi indikator kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
- Pengukuran besaran angka IPM Kabupaten Keerom.
- Analisis Situasi Pembangunan Manusia di Kabupaten Keerom.
- Rumusan kebijakan dalam rangka pembangunan manusia berdasarkan besaran angka IPM yang diperoleh dan hasil analisis situasi pembangunan manusia di Kabupaten Keerom.

#### 1.3.2. Lingkup Wilayah

Lokasi penelitian mencakup wilayah di Kabupaten Keerom.



#### 1.4. ISTILAH-ISTILAH YANG DIGUNAKAN (TERMINOLOGI)

- **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** ; Indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) yang disusun dari tiga dimensi : umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent standard of living*).
- **Dimensi Harapan Hidup** ; Salah satu dari komponen IPM. Nilai ini berkisar antara 0 – 100.
- **Dimensi Pendidikan** ; Indeks ini didasarkan pada kombinasi antara Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.
- **Dimensi Pengeluaran** ; Dimensi ini ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.
- **Angka Harapan Hidup ( $e_0$ )** ; Merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.
- **Harapan Lama Sekolah (HLS)** ; Didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.
- **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)** ; Merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.
- **Pengeluaran per Kapita Disesuaikan** ; Merupakan perbandingan antara Pengeluaran per Kapita Setahun Harga Konstan 2012 dan Paritas Daya Beli (*Purchasing Power Parity*). Nilai ini dihitung dengan menggunakan Metode Rao.

<https://keeromkab.bps.go.id>

## BAB II

### DATA DAN METODOLOGI

#### 2.1. BASIS DATA PEMBANGUNAN MANUSIA

##### 2.1.1. Sumber Data

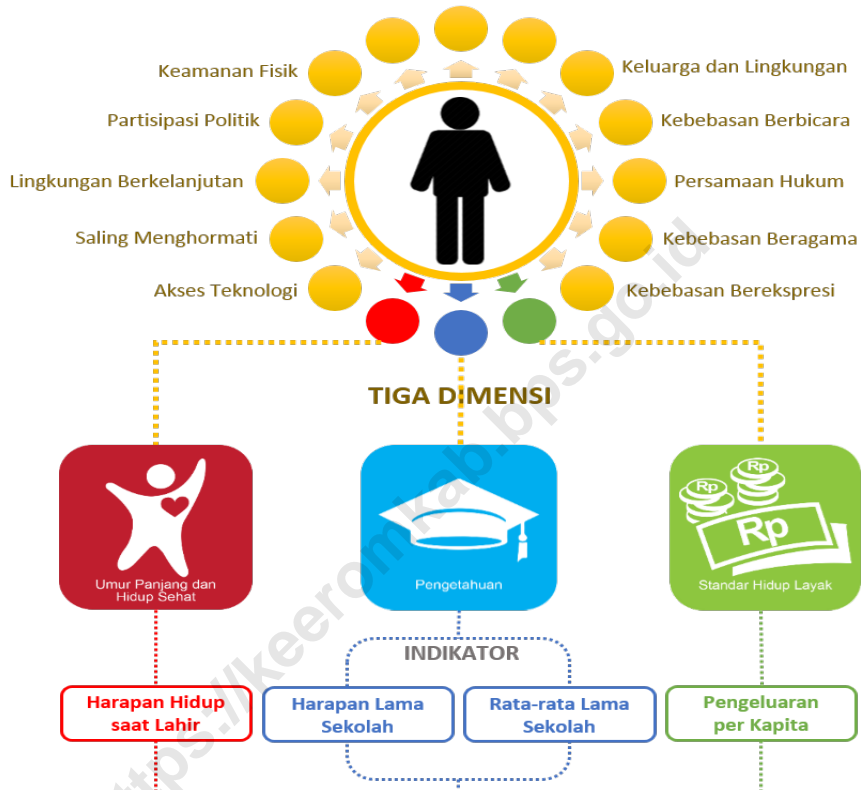
Perencana pembangunan manusia harus dapat memanfaatkan secara optimal data yang relevan baik yang dikumpulkan melalui sensus dan survei maupun yang diperoleh dari instansi-instansi terkait terutama yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, angkatan kerja, keluarga berencana dan fertilitas, perumahan dan sanitasi, dan pengeluaran rumah tangga.

Informasi yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan manusia dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Perencana harus menyadari bahwa kedua jenis informasi tersebut saling melengkapi atau menunjang sehingga keduanya diperlukan untuk analisis, monitoring dan evaluasi yang lebih baik.

##### 2.1.2. Data Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*). Sehingga untuk penyusunan IPM diperlukan data derajat kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat (**Gambar 2.1**).

**Gambar 2.1. Ilustrasi Dimensi-dimensi dalam IPM**



Dalam penyusunan publikasi “Indeks Pembangunan Manusia dan Analisis Situasi Pembangunan Manusia di Kabupaten Keerom Tahun 2017” data diatas diperoleh dari kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan setiap tahun oleh BPS. Survei tersebut merupakan kegiatan pengumpulan data yang mencakup berbagai aspek sosial dan ekonomi yang cukup kompleks. Susenas mengumpulkan berbagai informasi seperti kependudukan, kesehatan, fertilitas, pengeluaran rumah tangga, dan perumahan serta lingkungan.

## 2.2. PENDEKATAN IPM SEBAGAI PENUNJANG PEMBANGUNAN MANUSIA

Salah satu alat ukur yang dianggap dapat merefleksikan status pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). UNDP sejak tahun 1990 menggunakan IPM untuk mengukur laporan tahunan perkembangan pembangunan manusia.

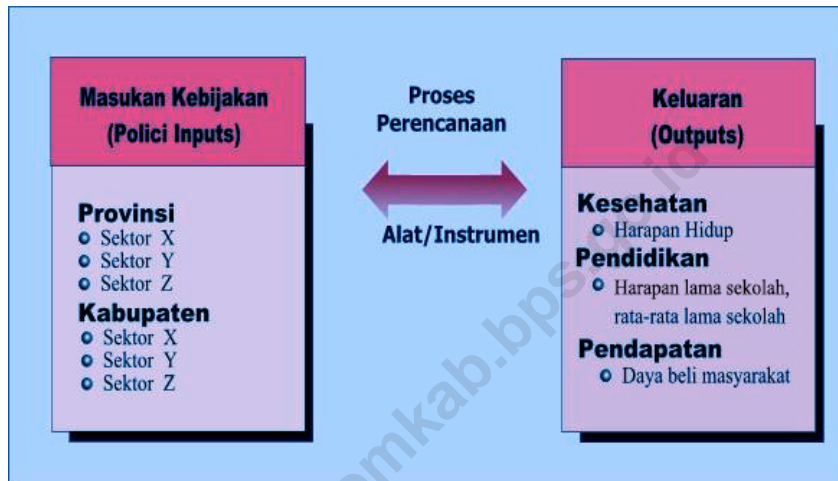
### 2.2.1. Pendekatan Pemanfaatan IPM dalam Pembangunan Manusia

Model sebagaimana pada **Gambar 2.2** dibawah menggambarkan mekanisme hubungan antara input-proses-output (IPO), dalam hal ini adalah kebijakan daerah berupa penetapan komposisi alokasi anggaran daerah per sektor/program dalam RAPBD. Sedangkan output dalam model ini diwujudkan dalam tiga parameter IPM.

Dalam model ini, IPM sebagai indeks komposit, bukanlah berperan sebagai alat perencanaan (*planning tools*) tetapi merupakan “*outcome*” atau hasil dari suatu proses perencanaan. Sekalipun IPM bukanlah sebagai alat perencanaan, namun dapat dimanfaatkan untuk menjadi arahan bagaimana anggaran pembangunan daerah seyogyanya dialokasikan agar mampu meningkatkan hasil pembangunan manusia yang tercermin dengan semakin tingginya IPM.

Untuk menghubungkan antara faktor input (RAPBD) di satu sisi dan faktor output (tiga parameter IPM), dalam proses perencanaannya untuk model ini memerlukan sebuah alat dalam bentuk *worksheet* (lembar kerja) yang dengan mudah digunakan melalui pemanfaatan komputer dan perangkat lunaknya dalam bentuk program aplikasi.

**Gambar 2.2**  
**Model Penggunaan Alat Penghubung Input dan Output**

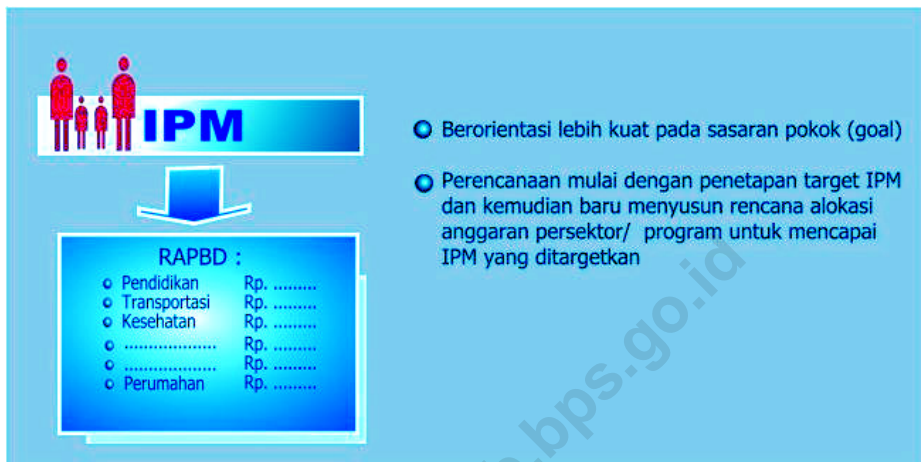


Implementasi model diatas dalam perencanaan pembangunan manusia, dapat diaplikasikan melalui tiga alternatif metode, yaitu :

1. ***Top down approach***

Pendekatan ini (lihat **Gambar 2.3**), bertitik tolak dari target peningkatan IPM yang ditetapkan masing-masing daerah. Berangkat dari target tersebut kemudian disusunlah rancangan alokasi sektor-sektor APBD dengan menggunakan alat/instrument perencanaan dalam bentuk "*worksheet*" yang mudah digunakan dengan bantuan komputer. Dengan menggunakan *worksheet* ini rencana komposisi alokasi setiap sektor pembangunan dalam proses penyusunannya dapat diubah-ubah hingga angka IPM yang ditargetkan secara perhitungan dapat dicapai.

**Gambar 2.3. Pendekatan dari “Atas ke Bawah” (*Top down approach*)**



## 2. *Bottom up approach*

Pendekatan ini (**Gambar 2.4**) berbanding terbalik dengan pendekatan yang pertama. Pemanfaatan IPM dalam perencanaan pembangunan daerah dengan pendekatan dari bawah (*bottom up*), berangkat dari target IPM yang ingin dicapai, tetapi dimulai dengan menetapkan komposisi rencana anggaran per sektor/program sebagaimana yang selama ini dilakukan, kemudian baru dihitung berapa pengaruhnya terhadap kenaikan IPM.

**Gambar 2.4 Pendekatan dari “Bawah ke Atas” (*Bottom-up approach*)**



### 3. *Hybrid approach*

Pendekatan ini (**Gambar 2.5**) merupakan kombinasi dari pendekatan pertama dan kedua, dimana dalam aplikasinya dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi IPM yang ditargetkan dan sisi komposisi anggaran per sektor daerah yang dialokasikan. Keseimbangan antara dua sisi tersebut merupakan perencanaan yang realistis.



**Gambar 2.5 Pendekatan Kombinasi *Top-down* dan *Bottom-up*  
(*Hybrid approach*)**



Dalam proses pengembangan IPM dalam perencanaan pembangunan daerah, masih terbuka adanya berbagai masukan penyempurnaan. Upaya pemantapan model ini akan diteruskan melalui tahapan-tahapan rencana pengembangan, yang di pusat dilaksanakan Ditjen Bangda bekerjasama dengan BPS dan UNDP, sedangkan di daerah dikoordinasikan oleh Bappeda.

### 2.2.2. Konsep Perhitungan IPM

Salah satu alat ukur yang dianggap dapat merefleksikan status pembangunan manusia adalah *Human Development Index* (HDI). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu ; Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), Pengetahuan (*knowledge*), dan Standar hidup layak (*decent standard of living*).

## 1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)

Pembangunan manusia harus lebih mengupayakan agar penduduk dapat mencapai “usia hidup” yang panjang dan sehat. Sebenarnya banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur usia hidup tetapi dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara global UNDP memilih indikator AHH (Angka Harapan Hidup) waktu lahir (*life expectancy at birth*). Angka kematian bayi atau *Infant Mortality Rate* (IMR) tidak digunakan untuk keperluan itu karena indikator itu dinilai tidak peka bagi negara-negara industri yang telah maju.

Seperti halnya IMR, AHH sebenarnya merefleksikan keseluruhan tingkat pembangunan dan bukan hanya bidang kesehatan. AHH didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Di Indonesia AHH dihitung dengan metode tidak langsung berdasarkan hasil Proyeksi SP2010 dengan menggunakan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau *Mortpack*. Metode ini menggunakan dua macam data dasar yaitu rata-rata anak yang dilahirkan hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Prosedur penghitungan AHH yang diperoleh dengan metode tidak langsung merujuk pada keadaan 3-4 tahun dari tahun survei.

## 2. Pengetahuan (*knowledge*)

Selain usia hidup, pengetahuan juga diakui secara luas sebagai unsur mendasar dari pembangunan manusia. Dengan pertimbangan ketersediaan data dan relevansi dalam mengukur pendidikan secara utuh, pengetahuan diukur dengan dua indikator yaitu Rata-rata Lama Sekolah dan angka Harapan Lama Sekolah. Sebagai catatan, terdapat perubahan variabel dalam dimensi pengetahuan jika dibandingkan

dengan publikasi IPM tahun sebelumnya. Sebelumnya, penghitungan IPM menggunakan variabel Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah. Namun, saat ini variabel Angka Melek Huruf sudah tidak tepat digunakan dalam penghitungan IPM. Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Penghitungan IPM dengan mengganti variabel Angka Melek Huruf dengan angka Harapan Lama Sekolah lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Berikut penjelasan singkat mengenai variabel Rata-rata Lama Sekolah dengan Harapan Lama Sekolah :

- **Rata-rata Lama Sekolah – RLS (*Mean Years of Schooling – MYS*)**

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP.

- **Harapan Lama Sekolah – HLS (*Expected Years of Schooling – EYS*)**

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena

mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren yaitu dari Direktorat Pendidikan Islam.

Rumus penghitungan HLS adalah sebagai berikut :

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan:

$HLS_a^t$	Harapan Lama Sekolah pada umur $a$ di tahun $t$
$E_i^t$	Jumlah penduduk usia $i$ yang bersekolah pada tahun $t$
$P_i^t$	Jumlah penduduk usia $i$ pada tahun $t$
$i$	Usia ( $a, a + 1, \dots, n$ )
$FK$	Faktor koreksi pesantren

### 3. Standar Hidup Layak

Selain usia hidup dan pengetahuan, unsur dasar pembangunan manusia yang diakui secara luas adalah standar hidup layak. Banyak indikator alternatif yang dapat digunakan untuk mengukur unsur ini. UNDP menggunakan PNB per kapita untuk mengukur standar hidup layak. PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data Susenas.

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari

Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungannya menggunakan Metode Rao. Berikut rumus penghitungan menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan :

$$Y_t^{**} = \frac{Y_t^*}{\text{Paritas Daya Beli}}$$

Keterangan:

- $Y_t^{**}$  : rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan
- $Y_t^*$  : Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012

Dalam menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan dibutuhkan nilai  $Y_t^*$  (Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012) dan Paritas Daya Beli atau PPP (*Purchasing Power Parity*). Berikut rumus penghitungan yang digunakan:

$$Y_t^* = \frac{Y'_t}{IHK_{(t,2012)}} \times 100$$

Keterangan:

$Y_t^*$  = Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012

$Y'_t$  = Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun pada tahun t

$IHK_{(t,2012)}$  = IHK tahun t dengan tahun dasar 2012

Perhitungan PPP/unit dilakukan sesuai rumus:

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left( \frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m}$$

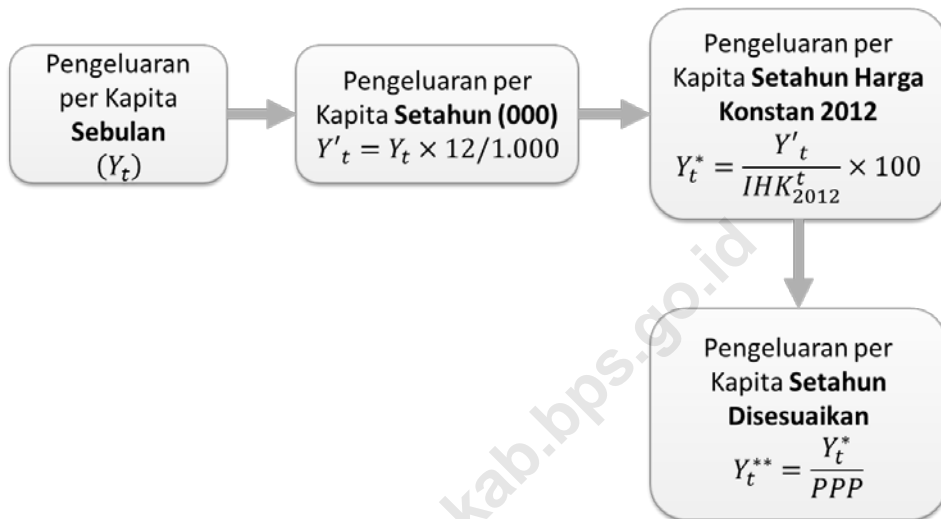
Keterangan:

$p_{ik}$  : harga komoditas  $i$  di Jakarta Selatan

$p_{ij}$  : harga komoditas  $i$  di kab/kota  $j$

$m$  : jumlah komoditas

**Gambar 2.6. Ilustrasi Penghitungan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan**

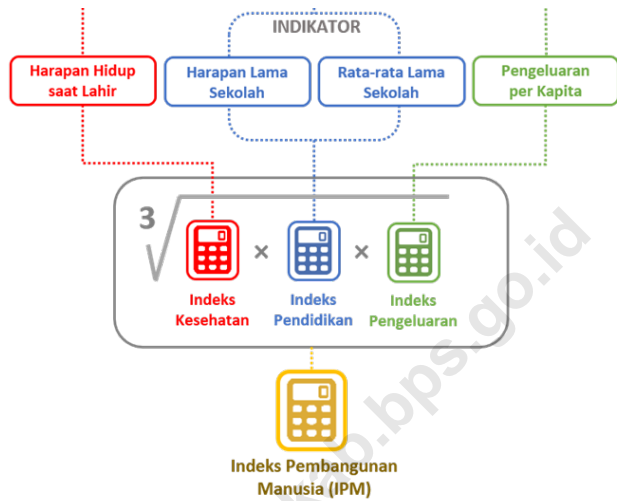


### 2.2.3. Tahapan Perhitungan IPM

Beberapa tahapan dalam penghitungan IPM dapat diilustrasikan seperti pada **Gambar 2.7**, penjelasannya adalah sebagai berikut:

- **Tahap pertama** penghitungan IPM adalah menghitung indeks masing-masing komponen IPM (Indeks Harapan Hidup =  $I_{kesehatan}$  , Pengetahuan =  $I_{pengetahuan}$  dan Standar Hidup Layak =  $I_{pendapatan}$ ) dengan rumus seperti pada gambar 2.8.

**Gambar 2.7. Ilustrasi Tahapan Penghitungan IPM**



**Gambar 2.8. Rumus Penghitungan Indeks dalam IPM**

**Dimensi Kesehatan**



$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

**Dimensi Pendidikan**



$$I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

**Dimensi Pengeluaran**



$$I_{pendapatan} = \frac{\ln(\text{pendapatan}) - \ln(\text{pendapatan}_{min})}{\ln(\text{pendapatan}_{maks}) - \ln(\text{pendapatan}_{min})}$$



**Tabel 2.1. Tabel Maksimum Minimum Indikator IPM**

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Tahun	20	20	85	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP US\$)	1.007.436* (Rp)	107.721 (PPP US\$)	26.572.352** (Rp)

Keterangan:

\* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua

\*\* Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

- **Tahapan kedua** perhitungan IPM sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$

- **Tahap ketiga** adalah menghitung kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah

ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya. Berikut rumus Pertumbuhan IPM:

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

Keterangan:

$IPM_t$  : IPM suatu wilayah pada tahun t

$IPM_{t-1}$  : IPM suatu wilayah pada tahun (t-1)

#### 2.2.4. Kategori Peringkat Pembangunan Manusia

Pengklasifikasian pembangunan manusia bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam dalam hal pembangunan manusia. Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu :

Tabel 2.2. Klasifikasi Capaian IPM



<https://keeromkab.bps.go.id>

### BAB III

## PROFIL KABUPATEN KEEROM

### 3.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Keerom merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang sebelum berdiri menjadi kabupaten merupakan bagian dari Kabupaten Jayapura. Hingga dengan payung hukum UU RI No. 26 Tahun 2002, Keerom resmi menjadi kabupaten yang berdiri sendiri.

Dengan ketinggian berkisar antara 0 sampai 2.000 meter di atas permukaan laut (Mdpl), wilayah Kabupaten Keerom merupakan lereng dengan kemiringan lebih dari 40 persen. Sebagian besar wilayah yakni seluas 5.722,96 Km<sup>2</sup> (61,11% dari total wilayah) berada pada ketinggian 400 – 1.500 Mdpl. Distrik Arso, Skanto, dan Arso Timur merupakan wilayah terendah dengan ketinggian di antara 0 sampai 1.000 Mdpl.

Menempati wilayah seluas 9.365 Km<sup>2</sup>, Kabupaten Keerom memiliki letak geografis yang berbatasan langsung dengan Negara Papua New Guinea (PNG) di sebelah timur. Sedangkan wilayah sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pegunungan Bintang, di sebelah utara berbatasan dengan Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapura di sebelah barat. Secara geografis kabupaten ini berada di antara 140°15' - 141°0' Bujur Timur dan 2°37'0" - 4°0'0" Lintang Selatan.

Sementara itu, suhu yang berkisar antara 25,1°C – 32,0°C, menjadikan Kabupaten Keerom memiliki suhu yang cukup panas dengan kelembaban yang cukup tinggi (80,0% - 85,0%). Panasnya suhu di Kabupaten Keerom diimbangi dengan curah hujan yang cukup tinggi, sebesar 226,8 mm dan hari hujan sebanyak 204 hari. Kecepatan

angin berkisar antara 2,4 – 6,1 Knot. Sedangkan tekanan udara antara 1.010,0 mbps – 1.013,0 mbps.

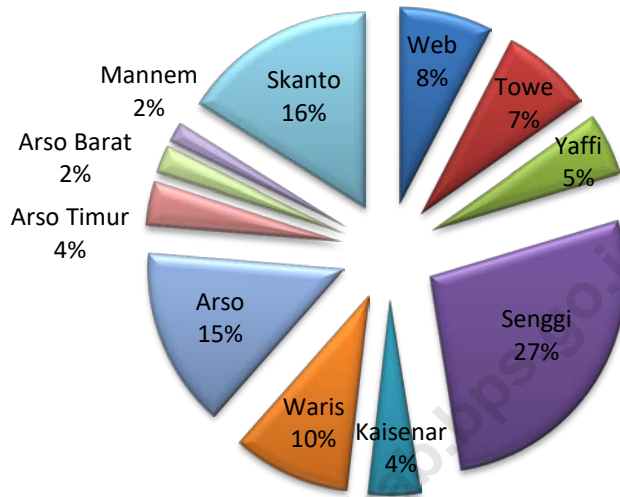
Hingga tahun 2017, Kabupaten Keerom terdiri dari 11 distrik, yaitu Distrik Web, Towe, Yaffi, Senggi, Kaisenar, Waris, Arso, Arso Timur, Arso Barat, Mannem, dan Skanto. Pada awal pembentukan Kabupaten Keerom hanya terdiri dari 5 distrik yaitu Distrik Arso, Skanto, Senggi, Web, dan Waris.

Dari sebelas distrik yang terdapat di Kabupaten Keerom, lima distrik diantaranya berbatasan langsung dengan Negara PNG, antara lain Distrik Web, Towe, Yaffi, Waris, dan Arso Timur. Panjangnya wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara PNG ini belum sebanding dengan jumlah personil yang bertugas di Pos Lintas Batas (PLB) yang tersedia.

Sampai 2017, PLB di Kabupaten Keerom berjumlah 5 pos, setiap pos dijaga oleh 2 personil. Pos tersebut tersebar di 5 kampung yakni di Kampung Skofro (Distrik Arso Timur), Pund (Distrik Waris), Yabanda (Distrik Yaffi), Akarinda (Distrik Yaffi), dan Bias (Distrik Towe).

Dari kesebelas distrik tersebut, Distrik Senggi yang berada di sisi barat daya merupakan distrik yang memiliki wilayah terluas yaitu 2.538,00 Km<sup>2</sup> atau 27,10 persen dari total luas wilayah Kabupaten Keerom. Sedangkan Mannem merupakan distrik dengan luas wilayah yang paling kecil seluas 160,36 Km<sup>2</sup> atau hanya 1,71 persen. Ibukota kabupaten yang berlokasi di Distrik Arso secara langsung berdampak terhadap kemudahan bagi wilayah yang terdapat di distrik ini untuk mengakses pusat pemerintahan.

Grafik 3.1 Persentase Luas Wilayah Kabupaten Keerom menurut Distrik, 2017

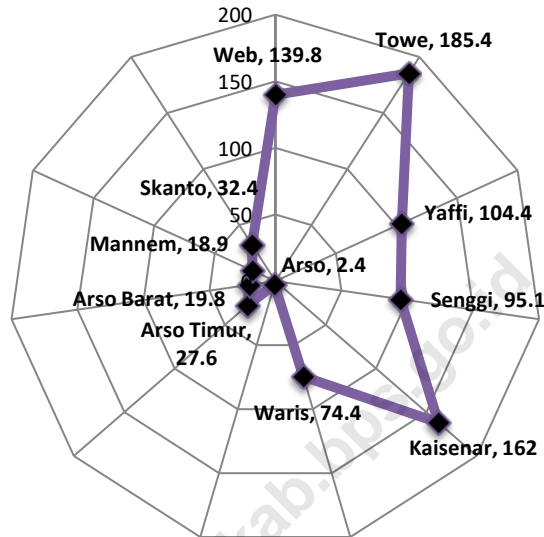


Wilayah berikutnya yang memiliki jarak relatif dekat dengan ibukota kabupaten adalah Distrik Arso atau sejauh 2,4 Km. Sedangkan distrik yang memiliki jarak terjauh dari ibukota kabupaten adalah Distrik Towe sejauh 185,4 Km sehingga akses tercepat hanya dapat ditempuh menggunakan transportasi udara.

Berdasarkan jarak tempuh yang menghubungkan suatu distrik ke distrik lainnya, jarak terdekat menghubungkan antara Distrik Arso Timur dan Mannem yang berkisar 15,9 Km. Sedangkan Distrik Towe yang berada di ujung tenggara yang relatif masih terisolir dan sulitnya medan yang ditempuh menyebabkan akses dari kampung menuju ibu kota distrik harus ditempuh dengan berjalan kaki. Sebagian besar kampung di distrik ini harus berjalan beberapa kilometer untuk mencapai pusat pemerintahan.

Bahkan, Kampung Towe Atas dan Towe Hitam untuk menuju pusat Distrik Towe, harus menempuh perjalanan yang lama dengan jalan kaki sehingga untuk mempercepat akses ke ibukota distrik maka masyarakat menggunakan pesawat.

**Grafik 3.2** Jarak dari Ibukota Distrik ke Ibukota Kabupaten (km), 2017



Sementara itu, berdasarkan lahan yang dimiliki, luas lahan bukan sawah di Kabupaten Keerom sebagian besar masih berfungsi sebagai hutan seluas 816.661 Ha atau 87,34 persen. Sisanya sebesar 70.050 Ha (7,49 %) dikelola sebagai lahan perikanan dan 4.877 Ha (0,52 %) sebagai lahan perkebunan. Sedangkan luas lahan yang berfungsi sebagai ladang hanya 15.704 Ha atau 1,68 persen dari total lahan bukan sawah.

Lahan yang difungsikan sebagai hutan lindung di Kabupaten Keerom merupakan penggunaan terbesar yakni 35,51 persen dari total luas lahan dan berfungsi sebagai hutan produksi konversi sebesar 17,68 persen. Penggunaan lahan terkecil adalah sebagai kawasan suaka alam (0,85 persen).

Distrik Arso, Arso Timur, Arso Barat, Mannem, Skanto, dan Senggi merupakan daerah yang mayoritas tersusun dari batuan sedimen tersier dan plestosin yang bercampur kapur konglomerat, debu, pasir kerikil, dan beberapa nopal. Deposit wartel atau rawa yang terbentuk akibat tertutupnya batuan sedimen tersier dan plestosin juga menyusun sebagian besar kabupaten ini, seperti Distrik Arso, Arso Timur, Arso Barat, Mannem, Skanto, dan Waris.



### 3.2. Pemerintahan

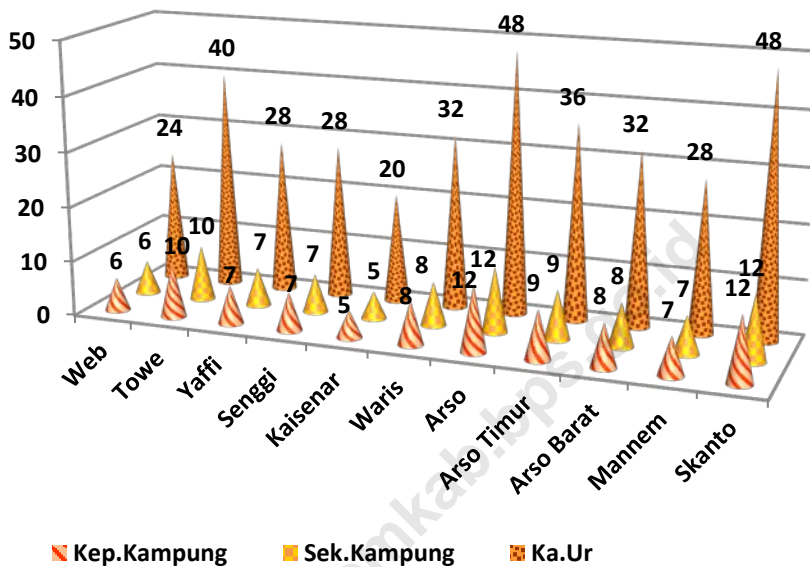
Jumlah kampung di Kabupaten Keerom tercatat sebanyak 91 kampung. Distrik Arso dan Skanto merupakan distrik dengan jumlah kampung terbanyak yakni masing-masing 12 kampung. Distrik Towe sebanyak 10 kampung, Arso Timur sebanyak 9 kampung, Web sebanyak 6 kampung, dan Kaisenar sebanyak 5 kampung. Distrik Waris dan Arso Barat masing-masing 8 kampung. Sedangkan Distrik Yaffi, Senggi, dan Mannem masing-masing terdiri dari 7 kampung.

Dari 91 kampung yang terdapat di Kabupaten Keerom, sebagian besar (98,90%) masih tergolong sebagai swadaya dan sampai dengan 2017 hanya terdapat satu kampung yang telah mencapai swakarsa.

Banyaknya kampung swadaya mengindikasikan bahwa tingkat pembangunan dan perkembangan kampung yang masih terbatas pada pemanfaatan potensi kampung untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

Mengamati struktur organisasi pemerintahan di tingkat kampung, secara keseluruhan setiap kampung di Kabupaten Keerom telah dilengkapi dengan perangkat kampung yang baik. Setidaknya setiap kampung telah memiliki kepala kampung, sekretaris kampung, dan beberapa kepala urusan kampung. Selain itu, keberadaan Ondoafi menjadi bagian penting dalam hubungan kemitraan antara pemerintah setempat dan masyarakat adat.

Grafik 3.3 Jumlah Perangkat Kampung menurut Distrik, 2017



Di Kabupaten Keerom terdapat 18 orang Ondoafi yang merupakan representasi masyarakat adat. Dalam bidang politik, peta politik di Kabupaten Keerom sedikit berbeda dengan peta politik nasional. PAN dan PKB yang merupakan partai besar di level nasional hanya menempatkan masing-masing 1 orang wakilnya di DPRD Kabupaten Keerom.

Sementara itu, dari 20 orang anggota DPRD, Partai Nasdem, Golkar, PDI-P, dan Partai Demokrat masing-masing menempatkan 3 orang wakilnya, sedangkan Partai Gerindra, Hanura dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masing-masing menempatkan 2 orang wakilnya. Kualitas kinerja DPRD tidak terlepas dari latar belakang pendidikan anggota dewan. Di DPRD Keerom, tercatat sebanyak 2 orang anggota dewan berpendidikan S2, 10 orang pendidikan DIII/S1, dan sisanya 8 orang berijazah SMA.

Berbagai produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD tidak terlepas dari rangkaian berbagai kegiatan. Sepanjang 2015 tercatat DPRD Kabupaten Keerom

telah melakukan 359 rapat kerja dan peninjauan. Sedangkan produk komisi hukum yang dihasilkan pada tahun 2014 sebanyak 104 keputusan, diantaranya 29 keputusan DPRD, 5 pendapat badan anggaran, 6 peraturan daerah, 2 keputusan pimpinan, serta berbagai keputusan lainnya.

Partisipasi masyarakat dalam berpolitik tercermin dalam kegiatan pemilu. Kegiatan politik terakhir yang berlangsung di Kabupaten Keerom adalah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 9 Desember 2015 yang lalu. Pemilihan kepala daerah ini memenangkan pasangan Drs. Celcius Watae, MH dan Muh. Markum SH yang akan memimpin kabupaten ini untuk masa jabatan 2015-2020.

Sementara itu, pada Pemilu Presiden 2014 yang lalu, total tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Keerom sebanyak 123 TPS. Sebanding dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu besar, Distrik Arso memiliki TPS paling banyak yakni 47 TPS. Sedangkan daftar pemilih tetap yang dibuat oleh KPUD Kabupaten Keerom pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 tercatat sebanyak 46.770 pemilih.

Keterlibatan masyarakat dalam menentukan pemimpin bagi suatu wilayah merupakan proses pembelajaran demokrasi yang baik. Adanya pemimpin yang tepat dan dicintai oleh masyarakatnya pada akhirnya akan mendorong pemerintahan yang dapat bersinergi dengan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

### 3.3 Perekonomian

#### 3.3.1 Pertanian

Sektor pertanian mempunyai kontribusi penting terhadap perekonomian. Sektor ini pun berperan penting dalam penyediaan kebutuhan pangan manusia seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang berarti bahwa kebutuhan akan pangan juga semakin meningkat.

Pada subsektor pertanian tanaman pangan, pada tahun 2017 tercatat produksi padi sebesar 2.240,54 ton atau meningkat sebesar 58,47 persen dibandingkan tahun 2015 yang tercatat sebanyak 1.413,9 ton. Peningkatan produksi yang terjadi disebabkan bertambahnya luas panen padi dari 370,0 Ha pada tahun 2015 menjadi 572,0 Ha pada 2017. Tercatat rata-rata produksi per hektar pada tahun 2017 mencapai 3,92 Ton/Ha.

Kondisi yang sama terjadi pada produksi tanaman palawija yang menunjukkan penurunan produksi. Produksi jagung meningkat 77,66 persen pada 2017, sedangkan produksi ubi jalar menurun 53,34 persen. Sementara itu produksi ubi kayu menurun sebesar 40,0 persen pada tahun 2017. Produksi kacang kedelai pada tahun 2017 tercatat mencapai 649,4 ton.

Hubungan linier antara luas panen dan produksi tanaman bahan makanan juga terjadi pada tanaman sayuran. Peningkatan luas panen sangat mempengaruhi peningkatan produksi tanaman sayuran tersebut. Sebaliknya, penurunan luas panen juga mengakibatkan turunnya produksi tanaman sayuran tersebut. Hal ini, pada 2017 terjadi hampir pada semua jenis komoditas sayuran di Kabupaten Keerom.

Pada tanaman buah-buahan, tercatat produksi pisang masih menjadi komoditi unggulan. Pada tahun 2015 produksinya mencapai 1.183 ton. Produksi buah jeruk menempati urutan kedua. Produksinya sebesar 421 ton. Selain itu,

beberapa buah-buahan lain yang dihasilkan di Kabupaten Keerom diantaranya pepaya, salak, nanas, kedondong, dan nangka.

Selain subsektor tanaman pertanian dan perkebunan, peternakan juga merupakan subsektor yang memiliki peranan penting di Kabupaten Keerom. Hal ini didorong dengan adanya ketersediaan rumput sebagai pakan ternak yang mencukupi di kabupaten ini. Ternak yang banyak dipelihara oleh masyarakat Keerom antara lain sapi, kambing, dan babi.

Pada 2017 jumlah sapi tercatat sebanyak 14.612 ekor atau mengalami peningkatan sebesar 7,17 persen dibandingkan jumlah sapi pada tahun 2016. Jumlah kambing mengalami peningkatan pada tahun 2017. Dinas pertanian, peternakan dan perikanan Kabupaten Keerom mencatat pada tahun 2017 jumlah ternak kambing mencapai 6.187 ekor atau meningkat sebesar 1,58 persen bila dibandingkan dengan jumlah ternak kambing pada tahun 2016 yang tercatat sebanyak 6.091 ekor.

Peningkatan ternak ayam buras juga terjadi pada tahun 2017. Ternak ayam buras tercatat sebanyak 67.156 ekor pada tahun 2017 atau meningkat sebesar 3 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 65.196 ekor. Peningkatan ini disebabkan oleh jumlah peternak ayam yang semakin meningkat.

Para petani di Kabupaten Keerom juga mengembangkan usaha perikanan darat. Ikan mas, nila, mujair, dan lele, merupakan jenis ikan yang banyak diusahakan di kabupaten ini. Pengembangan perikanan darat ini sebagian besar dikembangkan di Distrik Skanto dan Arso.

Produksi ikan mujair dan lele menunjukkan penurunan. Produksi ikan mujair pada tahun 2017 sebesar 0,75 ton. Sedangkan ikan lele turun menjadi 74,71 ton.

Peningkatan produksi terjadi pada ikan nila dan mas. Produksi ikan nila naik menjadi 68,88 ton dan ikan mas naik menjadi 14,72 ton.

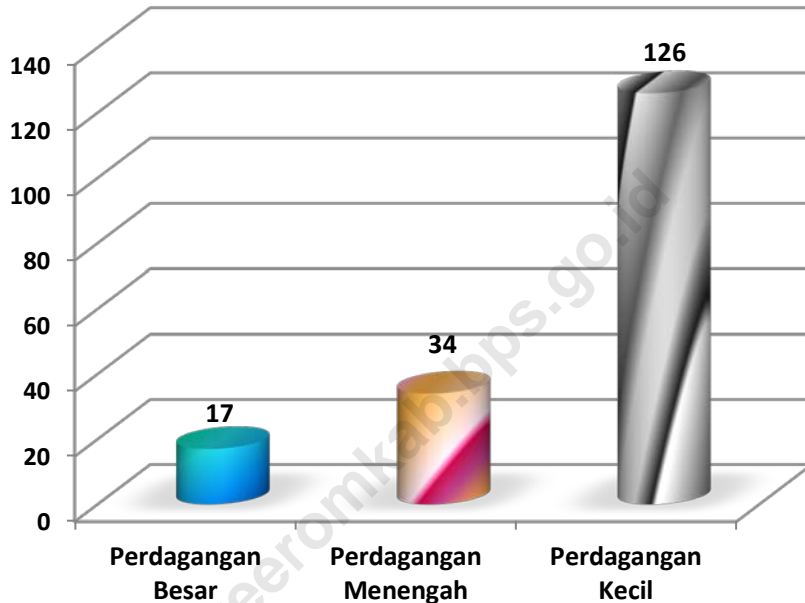
Pada 2017 nilai produksi perikanan darat sebesar 5,97 milyar rupiah. Peningkatan produksi perikanan darat pada 2017 dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah kolam perikanan darat. Jumlah kolam pada tahun 2017 naik 0,51 persen menjadi 597 kolam. Sementara jumlah rumah tangga perikanan darat pada tahun 2017 sebanyak 555 rumah tangga atau meningkat dibanding tahun 2016.

### **3.3.2 Perdagangan**

Di Kabupaten Keerom terdapat 295 perusahaan perdagangan pada tahun 2017. Jumlah tersebut meningkat 66,67 persen dibandingkan jumlah usaha perdagangan tahun sebelumnya. Sebanyak 71 usaha (24,07 persen) termasuk golongan SIUP-K, sedangkan SIUP-M dan SIUP-B masing-masing berjumlah 145 usaha (49,15 persen) dan 79 usaha (26,78 persen).

Sementara itu, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Keerom mencatat jumlah perusahaan di Kabupaten Keerom terus berkembang. Berdasarkan badan hukumnya, perusahaan berbadan hukum CV merupakan perusahaan terbanyak di Kabupaten Keerom. Perusahaan berbentuk CV tercatat sebanyak 368 perusahaan (56,88%), sedangkan berbadan hukum PT tercatat sebanyak 58 perusahaan (8,96%), dan 217 perusahaan (33,54%) perusahaan perseorangan.

Grafik 3.4 Jumlah Perusahaan Berdasarkan SIUP dan Perusahaan yang Telah Memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP) menurut Golongan Permodalan Perusahaan, 2017



### 3.3.3 Pendapatan Regional

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator makro ekonomi yang digunakan untuk melihat pergerakan ekonomi di suatu daerah. PDRB yang merupakan total dari nilai tambah yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan perekonomian yang ada di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh proses pembangunan daerah yang sedang berjalan.

PDRB Kabupaten Keerom tahun 2017 atas dasar harga berlaku mencapai nilai 2,54 triliun rupiah atau meningkat 10,11 persen dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 2,33 triliun rupiah. Bahkan bila dibanding empat tahun sebelumnya (tahun 2013) nilai tersebut meningkat 43,14 persen.

Bukan hanya PDRB atas dasar harga berlaku yang mengalami peningkatan, PDRB atas dasar harga konstan pun mengalami peningkatan yang cukup besar. PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Keerom pada tahun 2017 adalah sebesar 1,84 triliun rupiah lebih atau meningkat 5,74 persen dari tahun 2015 yang tercatat sebesar 1,75 triliun rupiah.

Kontributor tertinggi dalam pembentukan nilai PDRB tahun 2017 di Kabupaten Keerom adalah kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 33,91 persen atau sebesar 845,76 milyar rupiah. Meskipun masih mendominasi struktur perekonomian di Kabupaten Keerom, peranan kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan sudah jauh lebih rendah dibanding lima tahun sebelumnya yang rata-rata berkontribusi 36,94 persen.

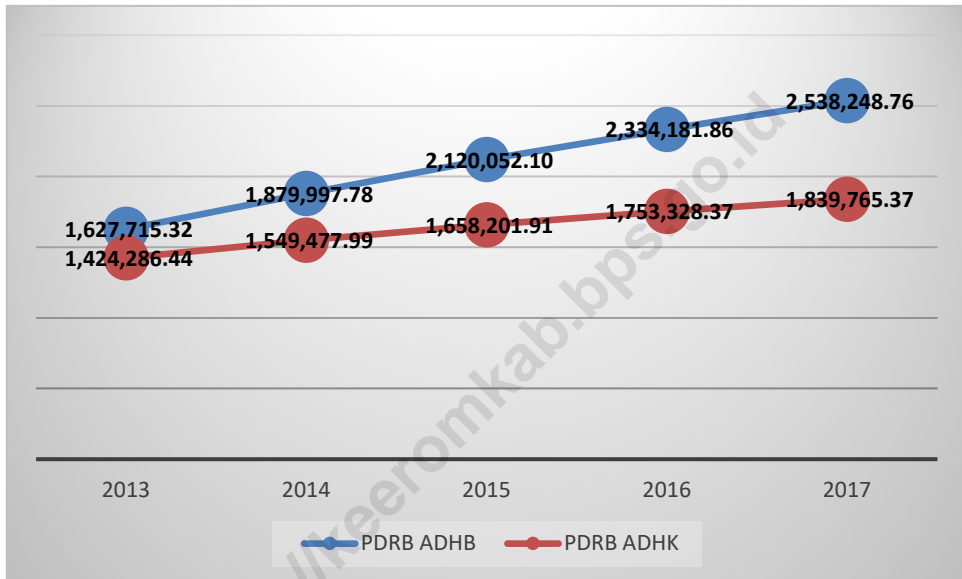
Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Keerom selama kurun waktu tiga tahun terakhir secara umum mengalami trend yang berfluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan satu digit. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Keerom mencapai 5,74 persen.

PDRB perkapita mengalami trend yang meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan meningkatnya total nilai tambah sektor-sektor ekonomi. Hingga tahun 2017, nilai PDRB perkapita kabupaten ini telah mencapai 39,44 juta rupiah lebih atau meningkat 11,23 persen dari tahun 2016 yang sebesar 35,46 juta rupiah. Bahkan nilai ini telah meningkat 76,62 persen dari lima tahun sebelumnya (2013) yang saat itu bernilai 22,33 juta rupiah.



# INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN KEEROM 2017

**Grafik 3.5** Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Keerom (juta rupiah), 2013-2017



<https://keeromkab.bps.go.id>

## BAB IV

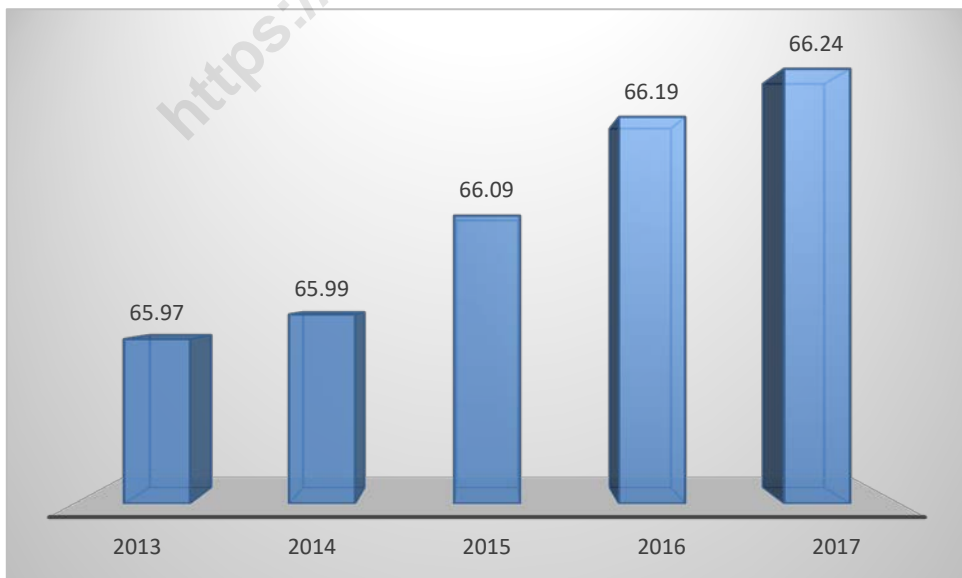
### INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN KEEROM

#### 4.1 SITUASI INDIKATOR-INDIKATOR UTAMA IPM KABUPATEN KEEROM

##### 4.1.1 *Angka Harapan Hidup (AHH)*

Salah satu komponen dalam penyusunan angka IPM adalah AHH (Angka Harapan Hidup). Semakin tinggi AHH, memberikan indikasi semakin tinggi kualitas fisik penduduk suatu daerah.

Grafik 4.1. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Keerom  
Tahun 2013 – 2017



Sumber : BPS

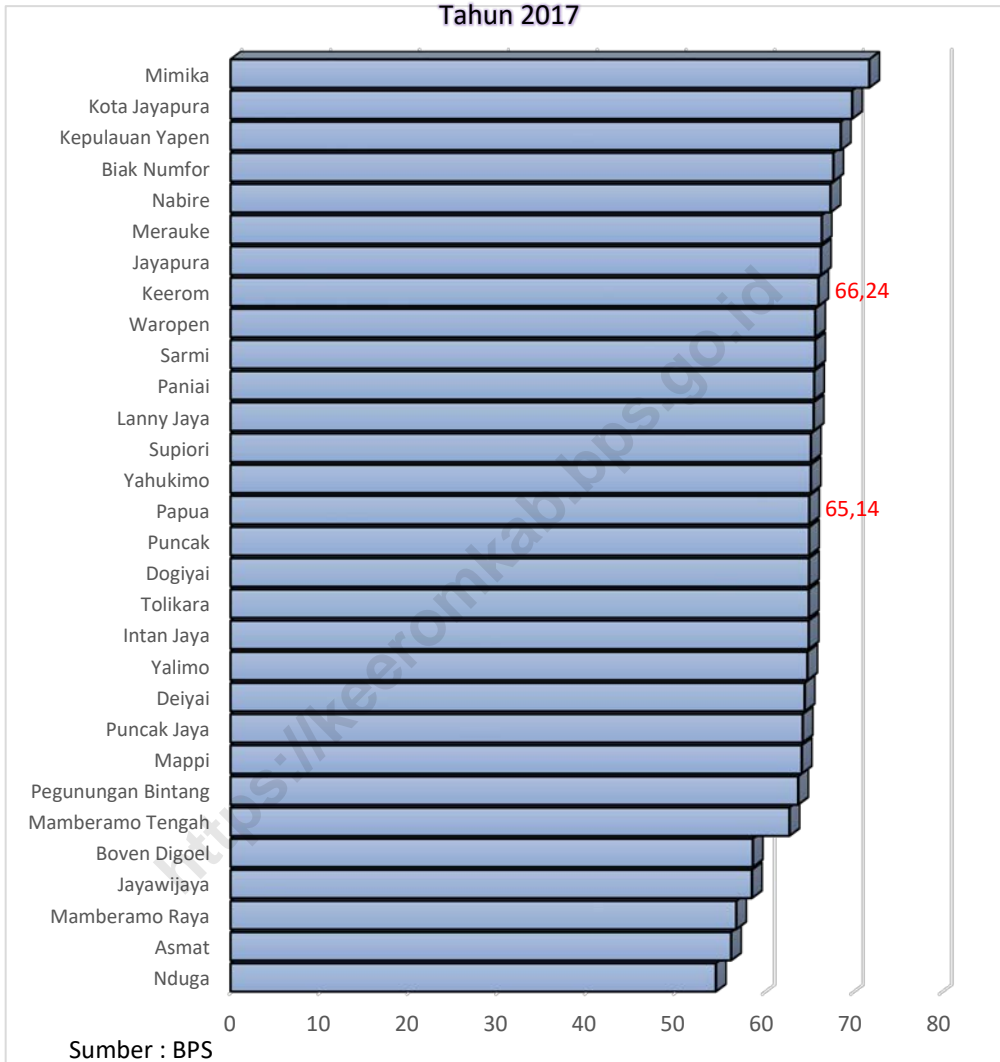
AHH penduduk Kabupaten Keerom pada tahun 2017 adalah sebesar 66,24 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kabupaten Keerom diharapkan dapat hidup hingga usia 66 tahun. Diagram pada **Grafik 4.1** menunjukkan adanya peningkatan AHH penduduk Kabupaten Keerom dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Angka harapan hidup erat kaitannya dengan keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan sehingga peningkatan angka harapan hidup merupakan indikasi yang positif bahwa pembangunan di sektor kesehatan di Kabupaten Keerom dari tahun ke tahun memberikan dampak yang positif bagi penduduk Kabupaten Keerom.

Untuk lebih memacu upaya pemerintah Kabupaten Keerom dalam meningkatkan AHH penduduknya, perlu diamati kedudukan Kabupaten Keerom dibanding dengan Kabupaten lainnya di Provinsi Papua dalam hal pencapaian AHH. Pada **Grafik 4.2** terlihat bahwa AHH penduduk Kabupaten Keerom termasuk peringkat 10 (sepuluh) besar terbaik (peringkat ke-8). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di sektor kesehatan di Kabupaten Keerom sudah cukup baik, tetapi harus lebih ditingkatkan lagi.

Berdasarkan hal tersebut, terindikasi bahwa pemerintah Kabupaten Keerom perlu mengadakan kajian bersama atau studi banding ke Kabupaten/Kota lainnya yang telah berhasil mencapai angka harapan hidup yang lebih tinggi di banding Kabupaten Keerom. Upaya tersebut bertujuan agar penduduk Kabupaten Keerom dapat lebih mencapai “usia hidup” yang panjang dan sehat.

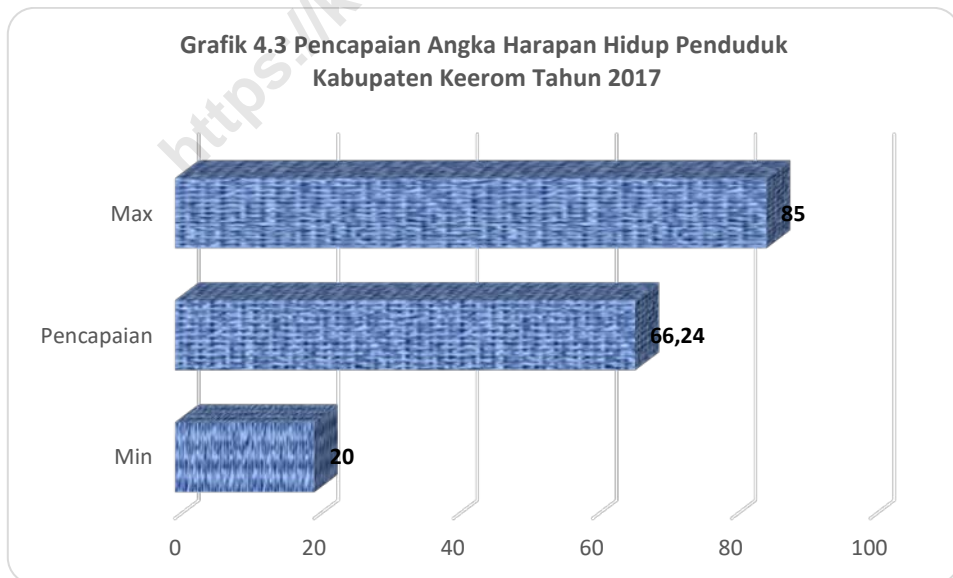
**Grafik 4.2. Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota Se-Papua  
Tahun 2017**



Untuk dapat melihat sejauh mana capaian AHH penduduk Kabupaten Keerom terhadap standar global menurut UNDP, dapat dilihat pada **Grafik 4.3**. UNDP mematok Standar global untuk angka harapan hidup penduduk adalah 85 tahun. Artinya, UNDP memasang target kualitas fisik penduduk sehingga rata-rata dapat bertahan hidup sampai usia 85 tahun. Dengan AHH penduduk Kabupaten Keerom

tahun 2017 sebesar 66,24 berarti nilai indeks pencapaian terhadap standar global adalah sebesar 71,14 persen.

Jika dilihat perkembangan indeks pencapaian AHH terhadap standar global dari tahun 2013 hingga tahun 2017, rata-rata mengalami peningkatan sebesar 0,68 persen per tahun. Hal ini berarti terjadi peningkatan kinerja yang positif bagi pemerintah daerah khususnya di bidang kesehatan. Sehingga, untuk dapat lebih cepat mencapai sumber daya manusia yang berkualitas dari segi kesehatan dirasa perlu adanya pemerataan pembangunan manusia di bidang kesehatan. Misalnya, dengan meningkatkan kualitas/kuantitas fasilitas kesehatan di daerah-daerah yang fasilitas kesehatannya masih kurang memadai seperti di Distrik Towe dan distrik lainnya serta kampung-kampung yang jarak jangkauan terhadap fasilitas kesehatannya masih terbilang jauh.



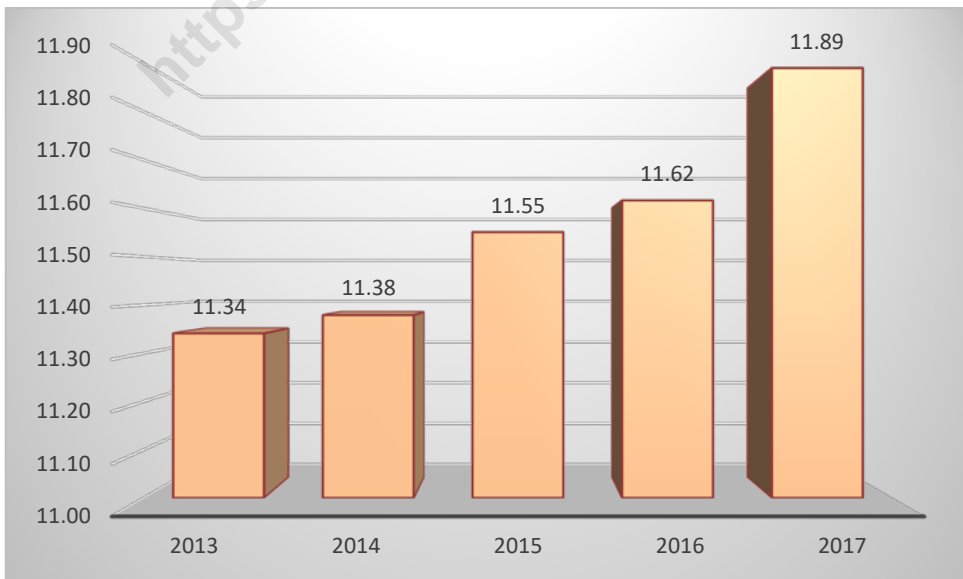
Sumber : BPS Kabupaten Keerom

Jika dibandingkan dengan indikator lain dalam IPM, pencapaian AHH terhadap standar global UNDP dari tahun ke tahun merupakan pencapaian yang paling cepat.

#### 4.1.2 Harapan Lama Sekolah (HLS)

Unsur utama IPM lainnya adalah indikator pendidikan yang terdiri dari HLS (Harapan Lama Sekolah) dan RLS (Rata-rata Lama Sekolah). HLS menunjukkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dikaji untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Grafik 4.4. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Keerom  
Tahun 2013 - 2017

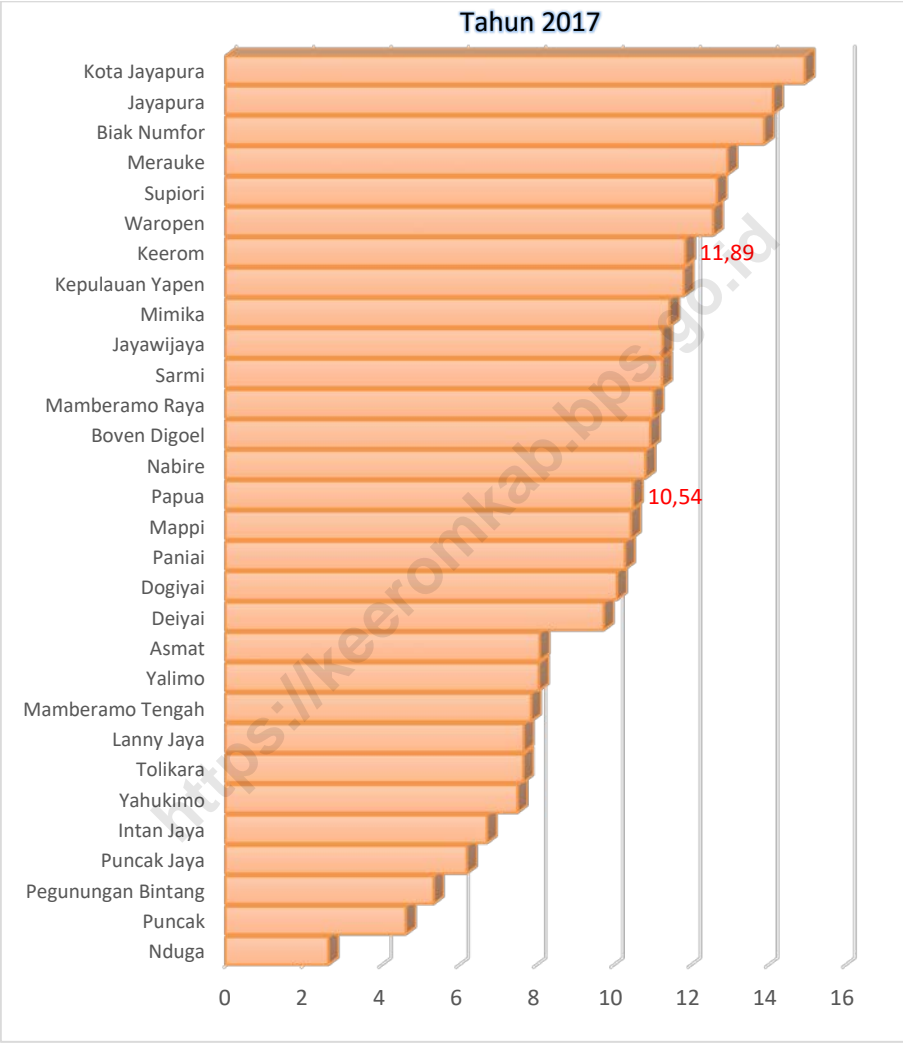


Sumber : BPS Kabupaten Keerom

Capaian HLS di Kabupaten Keerom cukup tinggi, pada tahun 2017. HLS Kabupaten Keerom adalah sebesar 11 tahun. Dari **Grafik 4.4** terlihat adanya peningkatan HLS dari tahun ke tahun. Terjadi peningkatan sebanyak 0,55 tahun atau 6 bulan dari tahun 2013 hingga tahun 2017, dengan persentase peningkatan sebesar 4,86 persen. HLS di Kabupaten Keerom menduduki posisi ketujuh diantara Kabupaten lainnya di Provinsi Papua **Grafik 4.5**. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Keerom harus memiliki strategi untuk dapat mewujudkan HLS agar kualitas penduduk Kabupaten Keerom dalam hal pendidikan bisa lebih baik.

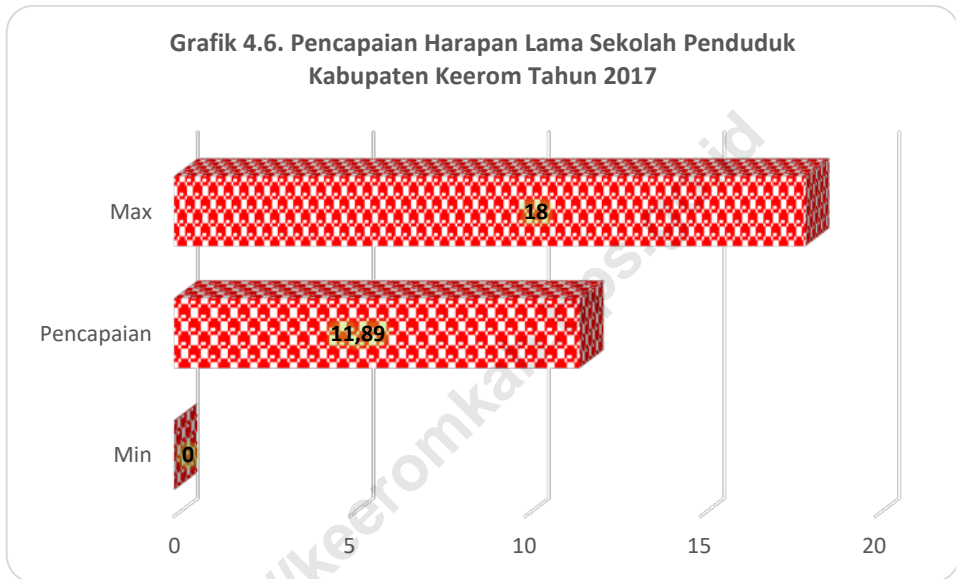


**Grafik 4.5. Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Se-Papua**



Sumber : BPS Kabupaten Keerom

Untuk melihat capaian HLS Kabupaten Keerom terhadap standar yang ditetapkan UNDP dapat dilihat pada **Grafik 4.6**.



Sumber : BPS Kabupaten Keerom

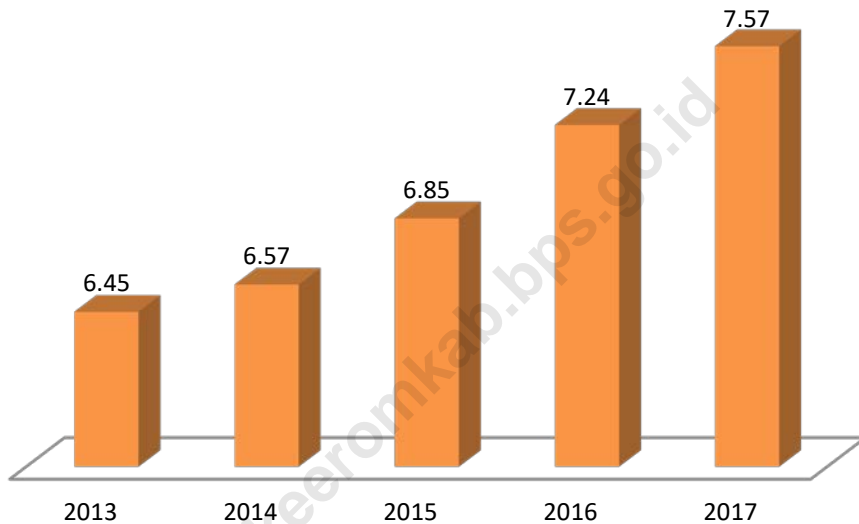
Berdasarkan **Grafik 4.6** pencapaian HLS Kabupaten Keerom pada tahun 2017 sebesar 66,06 persen. Artinya, tingkat pencapaian HLS Kabupaten Keerom sudah 66 persen dari target UNDP yaitu sebesar 18 tahun.

#### 4.1.3 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Unsur kedua indikator pendidikan dalam penghitungan IPM adalah rata-rata lama sekolah. Jika HLS (Harapan Lama Sekolah) merupakan lamanya (dalam tahun) pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh penduduk usia 7 tahun ke atas, maka RLS (Rata-rata Lama Sekolah) mendeskripsikan lamanya sekolah yang telah

dijalani penduduk usia 25 tahun ke atas. RLS digunakan untuk mengidentifikasi jenjang kelulusan pendidikan penduduk suatu daerah.

Grafik 4.7. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Keerom  
Tahun 2013 - 2017



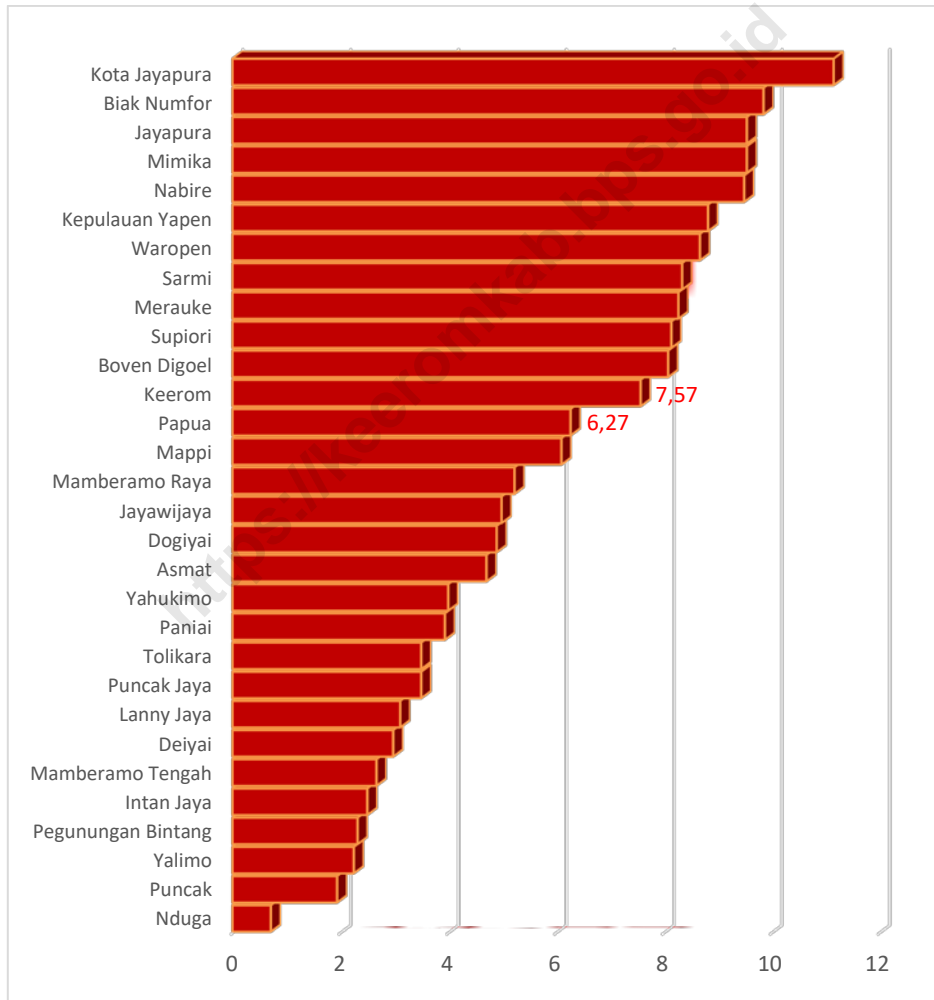
Sumber: BPS Kabupaten Keerom

Pada tahun 2017 angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Keerom sebesar 7,57 tahun. Angka rata-rata lama sekolah sebesar 7,57 diartikan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Keerom telah mengenyam pendidikan hingga kelas 1 SMP/Sederajat. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar 7,24. Kondisi ini bisa menjadi jalan bagi Pemerintah Kabupaten Keerom untuk melanjutkan target wajib belajar 9 tahun yang telah diterapkan .

Angka RLS Kabupaten Keerom menduduki peringkat ke-12 diantara Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Papua. Berdasarkan informasi pada **Grafik 4.8** dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya terdapat 5 Kabupaten/Kota yang telah berhasil dalam program pendidikan wajib belajar 9 tahun. Kabupaten/Kota yang

dimaksud antara lain Kota Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, Jayapura, Nabire dan Mimika.

**Grafik 4.8. Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Se-Papua Tahun 2017**



Sumber: BPS Kabupaten Keerom

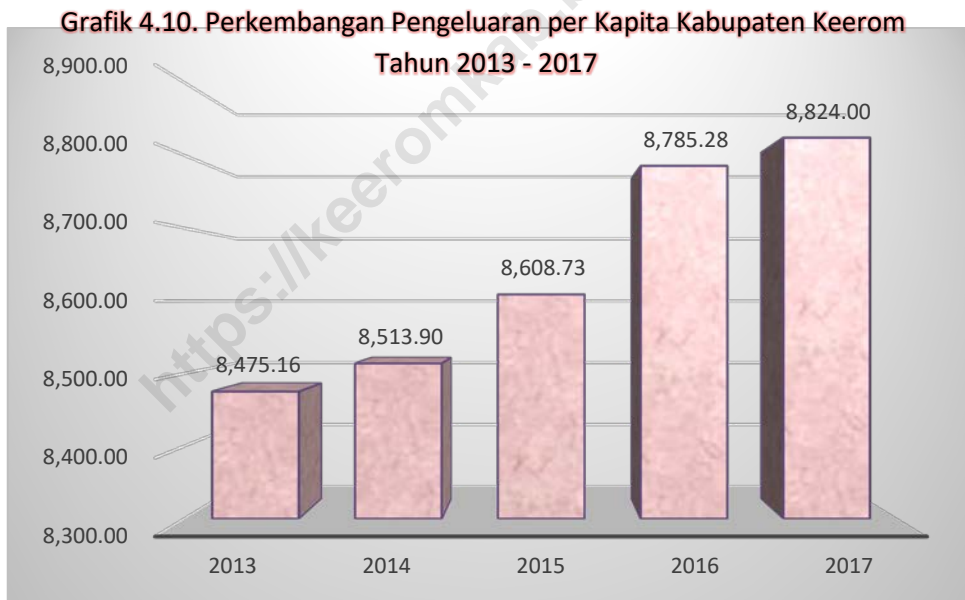
Untuk dapat melihat sejauh mana capaian angka RLS terhadap standar global yang telah ditetapkan oleh UNDP dapat dilihat pada **Grafik 4.9**.



Standar global yang ditetapkan oleh UNDP untuk RLS adalah 15 tahun atau setara dengan tingkat diploma 3 pada jenjang perguruan tinggi. Pada tahun 2017, pencapaian angka RLS Kabupaten Keerom terhadap standar global UNDP adalah sebesar 50,47 persen. Selama 5 tahun terakhir, rata-rata peningkatan indeks pencapaian RLS sebesar 0,03 persen per tahun. Indikator pendidikan di Kabupaten Keerom harus terus ditingkatkan dengan cara pemerintah lebih serius dalam menangani program pembangunan di sektor pendidikan, dan pembangunan di sektor penunjangnya yaitu sektor kesehatan dan ekonomi.

#### 4.1.4 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Unsur ketiga dalam IPM adalah indikator standar hidup layak yang diwakili oleh Pengeluaran per Kapita penduduk per tahun yang Disesuaikan. Pada tahun 2017 pengeluaran per kapita disesuaikan untuk penduduk Kabupaten Keerom agar dapat memenuhi standar hidup yang layak adalah sebesar Rp 8.824.000,- per tahun. Pengeluaran per kapita disesuaikan untuk penduduk Kabupaten Keerom mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Nilai perkembangan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan 5 tahun terakhir dapat dilihat pada **Grafik 4.10**.



Sumber: BPS Kabupaten Keerom

Untuk memahami unsur pendapatan per kapita disesuaikan ini sebagai indikator standar hidup layak, maka dibuatlah indeks di mana cara penghitungannya telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Hasil perhitungan indeks pendapatan pada tahun 2017 adalah sebesar 66,96 persen. Hal ini berarti dari segi kemampuan daya

beli, secara rata-rata penduduk Kabupaten Keerom mampu untuk mencukupi 66,96 persen kebutuhan hidup layak. Ilustrasi pencapaian pengeluaran per kapita disesuaikan untuk penduduk Kabupaten Keerom terhadap standard hidup layak menurut UNDP dapat dilihat pada **Grafik 4.11**.



Belum maksimalnya kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya merupakan hal yang perlu direnungkan faktor-faktor penyebabnya yaitu apakah dari segi jumlah persediaan barang/jasa yang lebih kecil dari jumlah yang dibutuhkan oleh para pengguna barang/jasa tersebut, dari segi rendahnya tingkat kemampuan penduduk untuk memproduksi barang/jasa yang dibutuhkannya, dari segi lambatnya peningkatan pendapatan penduduk, atau faktor lainnya. Sehingga, pemerintah perlu lebih memfokuskan terhadap program-program pembangunan khususnya program pembangunan yang mendukung peningkatan pembangunan ekonomi baik dari segi laju pertumbuhannya maupun pemerataan hasilnya khususnya di sektor usaha yang memberdayakan masyarakat.

#### 4.2 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KABUPATEN KEEROM

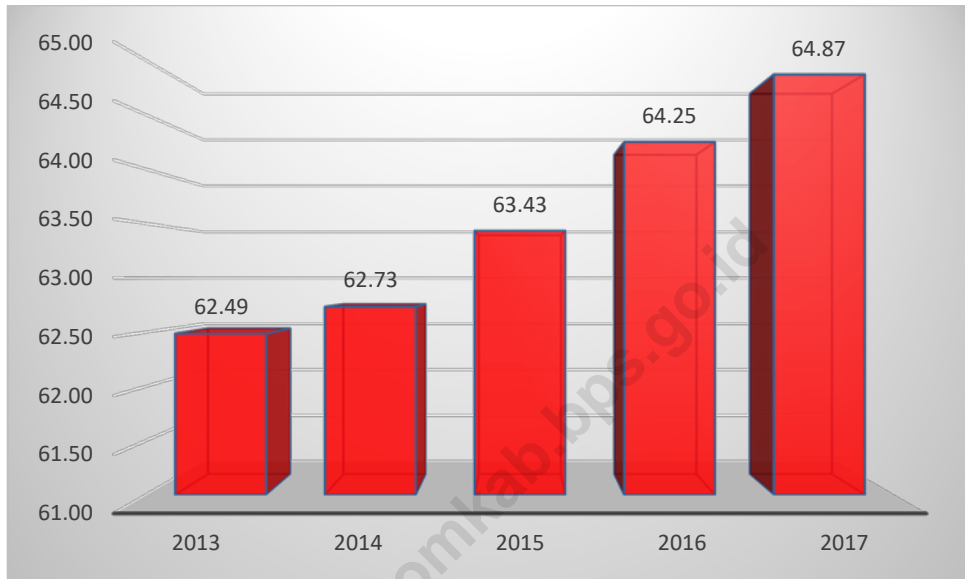
Setelah dihitung indeks dari ketiga unsur utama pembentuk IPM dan digabungkan dengan rumus tertentu akan diperoleh angka IPM. Perkembangan angka IPM, memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia pada suatu daerah.

Dari agregasi rata-rata geometrik ketiga indikator tunggal penyusun IPM Kabupaten Keerom yang telah dibahas sebelumnya, diperoleh angka IPM Kabupaten Keerom pada tahun 2017 sebesar 64,87. IPM tahun 2017 terdiri dari indeks kesehatan yaitu sebesar 71,06; indeks pendidikan (gabungan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah) sebesar 56,42 dan indeks pendapatan sebesar 66,18. Dari ketiga indeks yang menyusun IPM terlihat bahwa indeks kesehatan adalah indeks yang paling menonjol, hal ini berarti untuk menaikkan angka IPM Kabupaten Keerom, pemerintah Kabupaten Keerom sebaiknya lebih memprioritaskan terhadap program pendidikan dan program di bidang ekonomi.

Pencapaian angka IPM pada tahun 2017 bila dibandingkan dengan capaian tahun 2016 yaitu sebesar 64,25 bertambah 0,62 poin. Peningkatan tersebut menunjukkan keberhasilan pemerintah Kabupaten Keerom dalam perencanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya (**Grafik 4.12**). Berikut tabel perkembangan IPM beserta indikator-indikatornya di Kabupaten Keerom dari tahun 2013-2017.



Grafik 4.12. IPM Kabupaten Keerom  
Tahun 2013 - 2017



Sumber: BPS Kabupaten Keerom

Tabel 4.1 Perkembangan IPM Kabupaten Keerom Tahun 2014-2017

Komponen IPM	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Hidup (AHH)	66,09	66,19	66,24
Harapan Lama Sekolah (HLS)	11,55	11,62	11,89
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	6,85	7,24	7,57
Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan	8.608.731	8.785.277	8.824.000
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	63,43	64,25	64,87

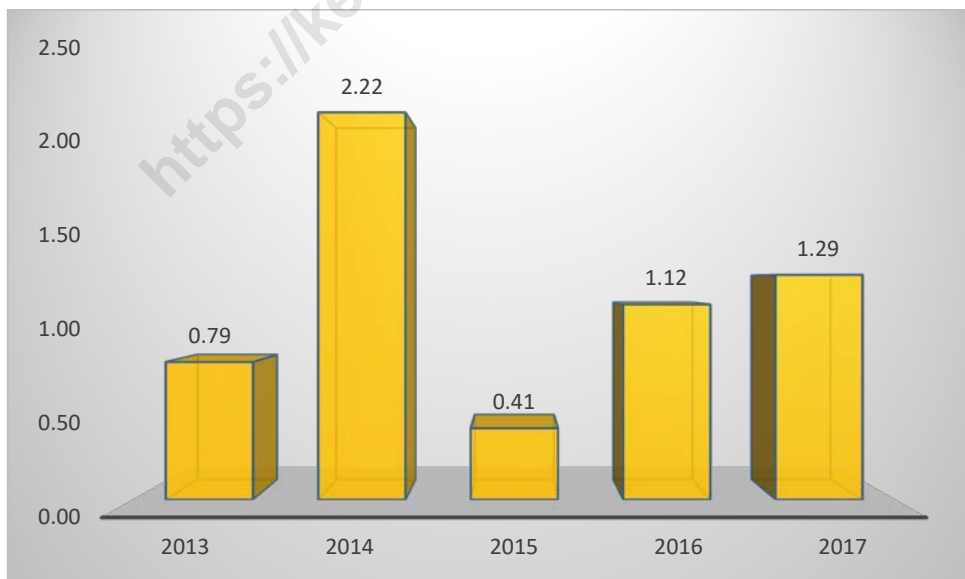
Sumber : BPS Kabupaten Keerom

Dengan capaian IPM 64,87 maka Kabupaten Keerom menurut Tabel Klasifikasi Pencapaian IPM (Indeks Pembangunan Manusia) pada **Tabel 2.2** (hal.22) dikategorikan dalam wilayah dengan **kinerja pembangunan manusia Sedang** yaitu capaian IPM 60 sampai dengan kurang dari 70.

#### 4.3 KECEPATAN IPM

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

Grafik 4.13. Pertumbuhan IPM Kabupaten Keerom  
Tahun 2013 - 2017



Sumber: BPS Kabupaten Keerom

## BAB V

### ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN KEEROM

#### 5.1 Indikator Kependudukan

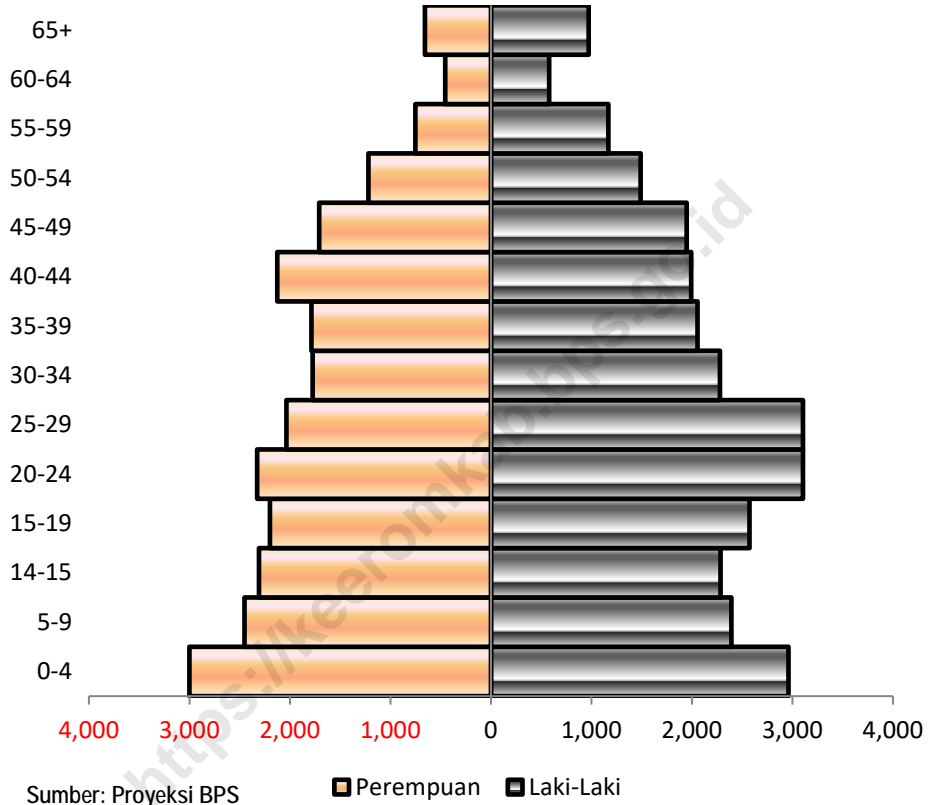
Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan. Penduduk tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan tetapi juga menjadi sasaran pembangunan. Oleh sebab itu, perkembangan penduduk harus diarahkan pada peningkatan kualitas, pengendalian kuantitas serta pengarahannya mempunyai ciri dan karakteristik yang menunjang tercapainya keberhasilan pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan penduduk.

##### 5.1.1 Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga

Jumlah penduduk Kabupaten Keerom tahun 2017 berdasarkan hasil proyeksi BPS Kabupaten Keerom sebanyak 55.018 jiwa, yang terdiri dari 29.483 laki-laki dan 25.535 perempuan dengan total jumlah rumah tangga sebanyak 13.085 rumah tangga. Pada **Gambar 5.1** terlihat bahwa sebaran penduduk paling banyak terdapat pada kelompok umur 0-4 tahun sebanyak 5.901 jiwa.

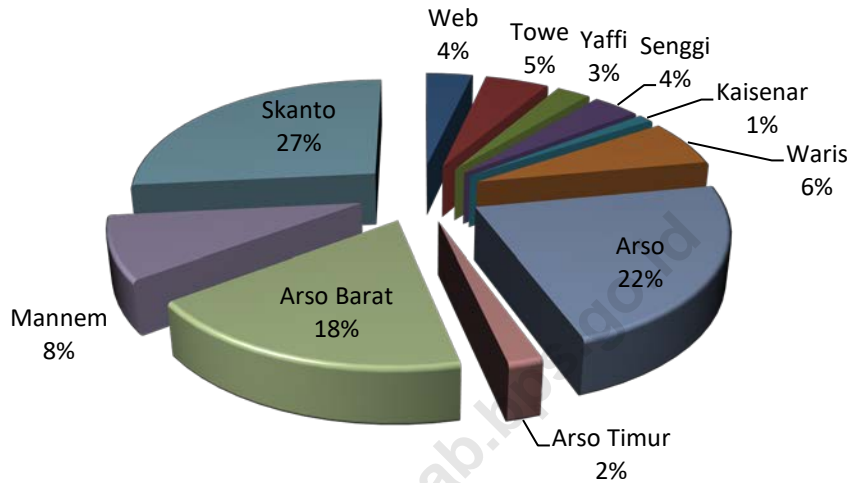
Selain itu, dapat dianalisa pula angka ketergantungan (*Dependency Ratio*) Kabupaten Keerom yaitu sebesar 45,45 yang artinya, secara rata-rata untuk setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) terdapat 45 penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan lebih dari 65 tahun). Angka ini dapat memberikan informasi potensi penduduk secara kuantitatif bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

**Grafik 5.1. Piramida Penduduk Kabupaten Keerom  
Tahun 2017**



Gambaran distribusi penduduk pada setiap distrik di Kabupaten Keerom dapat dilihat pada **Grafik 5.2**. Jumlah penduduk terbanyak berada di Distrik Skanto (14.833 jiwa) kemudian diikuti Distrik Arso (12.256 jiwa). Sedangkan jumlah penduduk terkecil ada di Distrik Kaisenar (529 jiwa).

**Grafik 5.2. Persentase Penduduk Kabupaten Keerom Menurut Distrik Tahun 2017**



Sumber: Proyeksi BPS

### 5.1.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk yang terjadi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang dinyatakan dengan persentase. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk adalah rata-rata besarnya perubahan jumlah penduduk yang terjadi setiap tahunnya yang dinyatakan dengan persentase.

Untuk menghitung laju pertumbuhan penduduk digunakan rumus sebagai berikut:

$$r = \left[ \left( \frac{P_n}{P_0} \right)^{1/n} - 1 \right] \times 100\%$$

Dimana:

- P<sub>n</sub> : Jumlah penduduk pada tahun ke-n  
P<sub>0</sub> : Jumlah penduduk pada tahun dasar  
n : Jumlah tahun antara tahun dasar dan tahun ke-n  
r : Laju pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah 1,64 persen dibandingkan dengan tahun 2017 . Artinya, dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2017, penduduk Kabupaten Keerom bertambah sebanyak 1,64 persen atau sebanyak 888 jiwa.

### 5.1.3 Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)

Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan jenis kelamin. Rasio ini merupakan perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dan penduduk perempuan di suatu daerah dalam waktu tertentu.

Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Rasio Jenis Kelamin} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Laki - Laki}}{\text{Jumlah Penduduk Perempuan}} \times 100$$

Rasio jenis kelamin Kabupaten Keerom tahun 2017 yaitu 115,32 yang artinya pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat 115 penduduk laki-laki.

#### 5.1.4 Rata-rata Anggota Rumah Tangga

Rata-rata anggota rumah tangga merupakan suatu indikator untuk menunjukkan rata-rata muatan suatu rumah tangga. Angka ini dapat digunakan sebagai acuan apakah keluarga di suatu daerah masih merupakan keluarga besar atau sudah merupakan keluarga kecil. Angka rata-rata anggota rumah tangga ini diperoleh dengan membandingkan jumlah penduduk dengan banyaknya rumah tangga.

Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Rata – rata Anggota Rumah Tangga} = \frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}}$$

Jumlah rumah tangga di Kabupaten Keerom tahun 2017 sebanyak 13.269 rumah tangga dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebesar 4,08 jiwa. Artinya, secara rata-rata terdapat 4 sampai dengan 5 anggota rumah tangga pada setiap rumah tangga di Kabupaten Keerom tahun 2017.

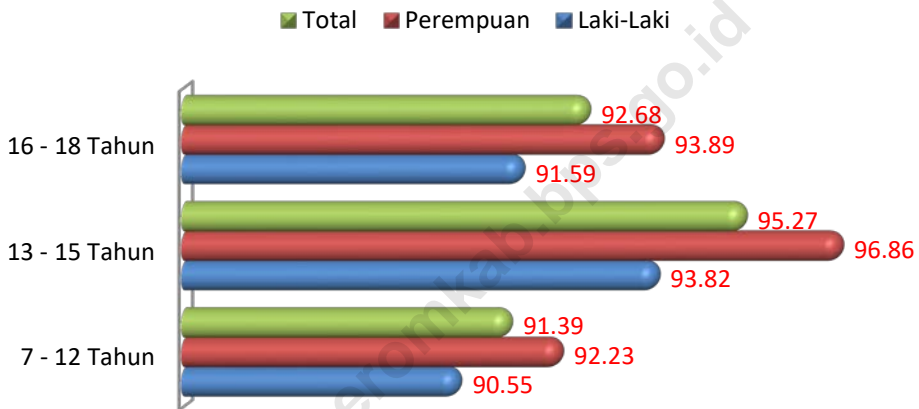
## 5.2. INDIKATOR PENDIDIKAN

### 5.2.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Salah satu indikator pendidikan adalah APS (Angka Partisipasi Sekolah). APS merupakan bagian dari indikator partisipasi penduduk untuk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. APS terbagi dalam kelompok usia sekolah. Dalam hal ini, APS dihitung untuk kelompok usia sekolah 7-12 tahun atau setara dengan rata-rata usia penduduk yang sekolah di jenjang SD/Sederajat, 13-15 tahun untuk jenjang

SMP/Sederajat, dan 16-18 tahun untuk jenjang SMA/Sederajat. Gambar 5.3 menggambarkan APS Penduduk Kabupaten Keerom menurut jenis kelamin.

**Grafik 5.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)  
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin  
Tahun 2017**



Sumber: Hasil Olahan Susenas 2017

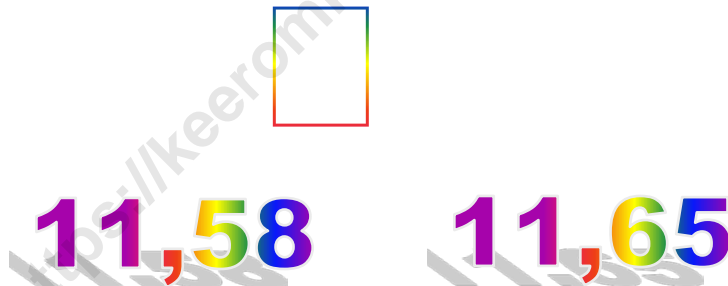
Secara total, APS Kabupaten Keerom tahun 2017 tertinggi berada pada kelompok usia SMP/Sederajat atau usia 13-15 tahun yaitu sebesar 95,27 persen dan yang terendah adalah pada kelompok usia SD/Sederajat atau 7-12 tahun yaitu 91,39 persen. Hal ini perlu mendapat perhatian bagi pemerintah daerah mengingat pada semua kelompok usia sekolah masih terdapat penduduk yang belum/tidak bersekolah lagi.



### 5.2.2. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Saat ini, HLS merupakan salah satu variabel dalam Dimensi Pendidikan untuk penghitungan IPM. Penjelasan mengenai HLS telah diuraikan pada Bab sebelumnya. Jika dihitung berdasarkan jenis kelamin, HLS Kabupaten Keerom seperti pada **Gambar 5.1.**

**Gambar 5.1. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Keerom  
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017**



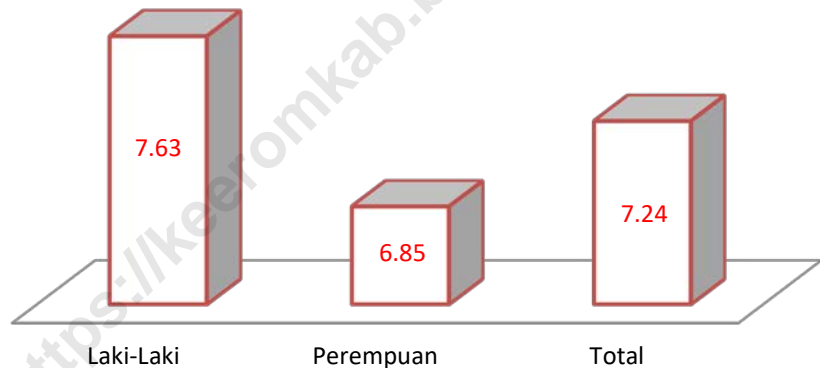
Sumber: Hasil Olahan Susenas 2017

Pada bab sebelumnya telah dideskripsikan bahwa HLS Kabupaten Keerom pada tahun 2017 adalah sebesar 11,62 tahun. Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin, HLS perempuan lebih besar dibandingkan HLS laki-laki. HLS Perempuan yaitu sebesar 11,65 tahun yang artinya bahwa pada setiap anak perempuan diharapkan dapat merasakan lamanya sekolah selama 11,65 tahun atau setara dengan jenjang SMA/ sederajat kelas 3 semester 2. Sementara itu, HLS laki-laki adalah sebesar 11,58 yang artinya bahwa pada setiap anak laki-laki diharapkan dapat mengenyam pendidikan selama 11,58 tahun atau setara dengan jenjang SMA/ sederajat kelas 3 semester 1.

### 5.2.3. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Pada **Grafik 5.4** disajikan *bar chart* untuk Variabel RLS yang dirinci menurut jenis kelamin. RLS Kabupaten Keerom adalah sebesar 6,85 tahun yang artinya secara rata-rata penduduk Kabupaten Keerom mengenyam pendidikan sampai dengan kelas 1 SMP.

**Grafik 5.4. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)  
Kabupaten Keerom Tahun 2017**



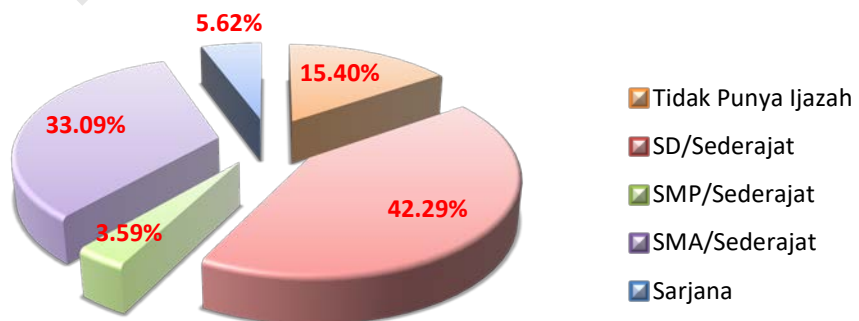
Sumber: Hasil Olahan Susenas 2017

RLS laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. RLS perempuan adalah 6,85 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk perempuan di Kabupaten Keerom mengenyam pendidikan sampai dengan kelas 1 SMP. Sementara itu RLS laki-laki adalah sebesar 7,63 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP.

#### 5.2.4. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka seseorang akan dapat lebih mudah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan menyerap kemajuan teknologi. Sebagai sumber daya manusia yang berkualitas, maka tamatan pendidikan tinggi diharapkan akan meningkatkan produktifitasnya sebagai tenaga kerja. Selanjutnya peningkatan produktifitas seseorang dalam bekerja dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Masih berhubungan dengan hasil rata-rata lama sekolah, indikator yang menunjukkan adanya peningkatan rata-rata lama sekolah adalah persentase penduduk yang berijazah SMP ke atas. Persentase kepemilikan ijazah tertinggi minimal SD/ sederajat ke atas pada tahun 2017 adalah 42,29. Gambaran mengenai distribusi penduduk menurut tingkat pendidikan, dapat dilihat pada **Grafik 5.5**.

**Grafik 5.5. Sebaran Penduduk Kabupaten Keerom Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2017**

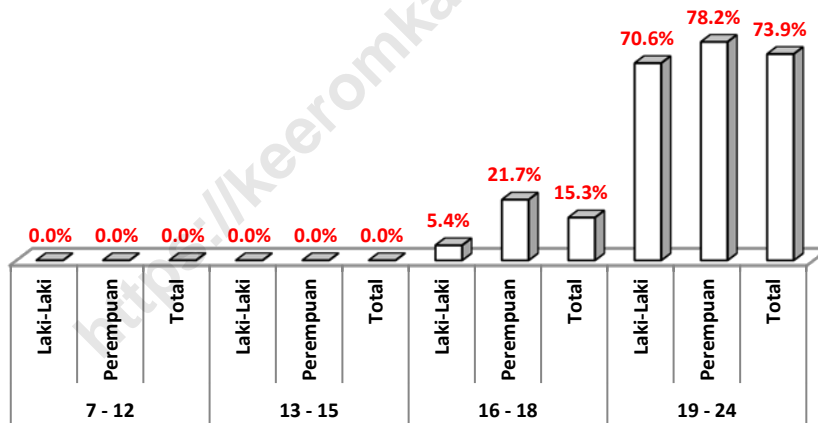


Sumber: Hasil Olahan Susenas 2017

### 5.2.5 Angka Putus Sekolah (APTS)

APTS merupakan proporsi penduduk menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk yang pernah/sedang bersekolah pada kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun, dan 19-24 tahun.

**Grafik 5.6. Angka Putus Sekolah (Apts) Kabupaten Keerom Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Usia Sekolah Tahun 2017**



Sumber: Hasil Olahan Susenas 2017

**Grafik 5.6** menyajikan data APTS Kabupaten Keerom dirinci menurut jenis kelamin. APTS kelompok usia 7-12 dan kelompok usia 13-15 merupakan APTS terendah diantara kelompok usia lainnya yaitu sebesar 0,00 persen. Artinya, tidak ada penduduk kelompok usia 7-12 dan kelompok usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah lagi. Sementara itu, APTS tertinggi berada pada kelompok usia 19-24 tahun yaitu 73,91 persen. Artinya untuk setiap 100 penduduk usia 19-24 tahun yang pernah/sedang bersekolah, terdapat 73 orang penduduk usia 19-24 tahun yang

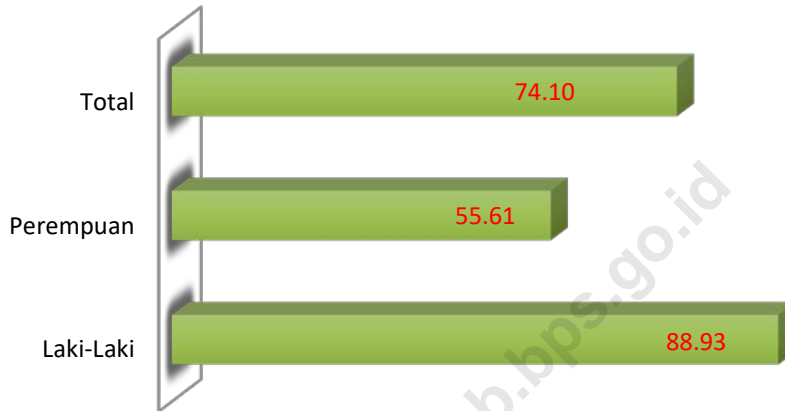
sudah tidak bersekolah lagi. Terdapat beberapa faktor terkait tingginya APTS pada kelompok usia 19-24 tahun diantaranya faktor biaya pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, dll.

### **5.3. INDIKATOR KETENAGAKERJAAN**

#### **5.3.1. Angkatan Kerja**

Kajian mengenai ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting sebab bekerja tidak hanya berarti untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Selain itu, ketenagakerjaan juga merupakan aspek mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Dimensi ekonomi menjelaskan kebutuhan manusia akan pekerjaan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan dimensi sosial dari pekerjaan berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu. Setiap upaya pembangunan kemudian selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan.

**Grafik 5.7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)  
Kabupaten Keerom Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017**



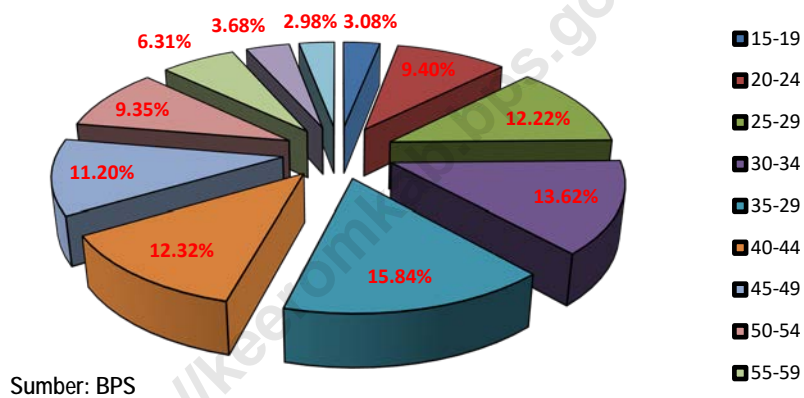
Sumber: BPS

**Grafik 5.7.** menunjukkan bahwa pada tahun 2017 jumlah penduduk yang sudah aktif dalam perekonomian (angkatan kerja) adalah 74,10 persen dari penduduk usia kerja. Persentase tersebut merupakan ukuran tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang menunjukkan bahwa penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja Kabupaten Keerom cukup besar sehingga harus diimbangi dengan permintaan tenaga kerja yang besar pula agar angka pengangguran dapat lebih ditekan. Jika dianalisa menurut jenis kelamin, TPAK laki-laki lebih besar dibandingkan dengan TPAK perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi kuantitas, Kabupaten Keerom memiliki potensi angkatan kerja laki-laki yang cukup banyak, sehingga diperlukan adanya peningkatan kualitas agar mampu lebih produktif dalam mengisi pasar-pasar tenaga kerja.

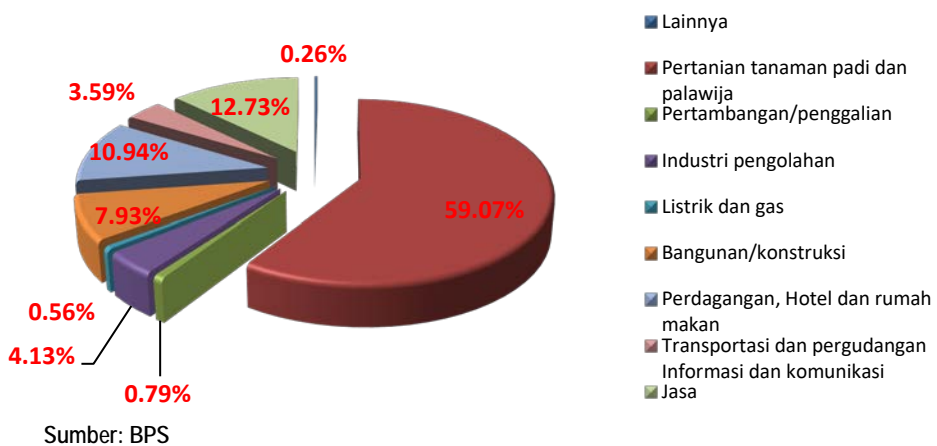
### 5.3.2. Penduduk Bekerja

Bila dibedakan menurut golongan umur, penduduk yang bekerja pada umumnya berumur 25-54 tahun yang merupakan usia prima (*prime age*) yaitu sejumlah 74,54 persen dari penduduk bekerja.

Gambar 5.8. Penduduk Bekerja Menurut Kelompok Umur Kabupaten Keerom Tahun 2017



Grafik 5.9. Sebaran Lapangan Usaha Penduduk Bekerja Kabupaten Keerom Tahun 2017



Persentase pekerja ditinjau menurut lapangan pekerjaan seperti dilihat pada **Gambar 5.9** menunjukkan bahwa distribusi sektor penduduk bekerja di Kabupaten Keerom bertumpu pada kesempatan kerja di sektor pertanian dengan nilai proporsi hampir 60 persen. Pada tahun 2017, penduduk yang bekerja di sektor jasa sebanyak 12,73 persen. Sementara itu, sebanyak 10,94 persen penduduk bekerja di sektor perdagangan, hotel dan rumah makan.

#### 5.4. INDIKATOR KESEHATAN

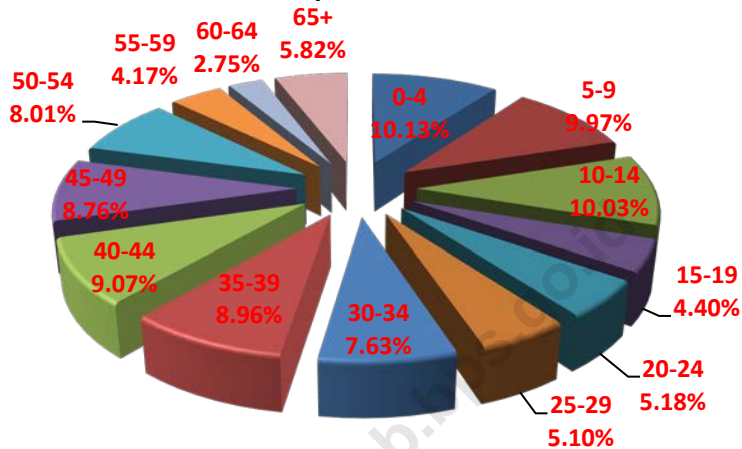
##### 5.4.1 Angka Morbiditas (AM)

AM (Angka Morbiditas) bermanfaat untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat yang bersangkutan. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan hasil olahan data Susenas 2017, Angka Morbiditas Kabupaten Keerom adalah 19,81 persen yang artinya bahwa 19,81 persen atau sebanyak 10.606 jiwa penduduk Kabupaten Keerom mengalami keluhan kesehatan. Agar lebih tepat dan fokus dalam pengambilan kebijakan, pada **Grafik 5.10** tersaji data persentase penduduk mengalami keluhan kesehatan dirinci menurut kelompok umur.



**Grafik 5.10. Angka Morbiditas Kabupaten Keerom  
Menurut Kelompok Umur Tahun 2017**



Sumber: Hasil Olahan Susenas 2017

Persentase penduduk mengalami kesehatan terbesar berada pada kelompok usia 0-4 tahun yaitu sebesar 10,13 persen. Kelompok usia 0-4 tahun merupakan kelompok usia dimana balita mulai menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan sekitar yang juga dibarengi dengan pertumbuhan dan perkembangan secara fisik sehingga menyebabkan balita rentan mengalami keluhan kesehatan.

## 5.5. INDIKATOR KONSUMSI

### 5.5.1 Pengeluaran Penduduk menurut Jenis Komoditi

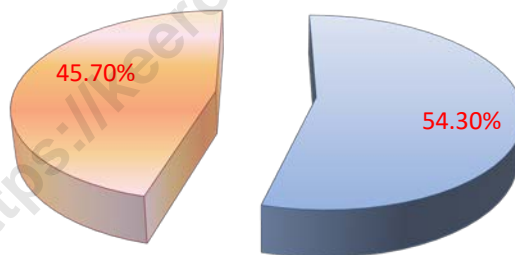
Pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, pengeluaran untuk konsumsi makanan masih relatif besar (mendekati 50%) dari total pengeluaran per kapita. Sebaliknya pada negara maju pengeluaran per kapita yang bersifat sekunder seperti aneka barang dan jasa yang mencakup pengeluaran untuk perawatan

kesehatan, rekreasi, olah raga, pendidikan dan lain-lain, adalah merupakan bagian terbesar dari pengeluaran per kapita.

Berdasarkan hasil pengolahan data Susenas 2017 pada **Grafik 5.11**, proporsi rata-rata pengeluaran nonmakanan per kapita di Kabupaten Keerom selama 1 bulan adalah sebesar 45,70 persen sedangkan proporsi pengeluaran makanan adalah sebesar 54,30 persen. Rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita sebulan di Kabupaten Keerom pada tahun 2017 adalah Rp. 1.034.240,-.

**Grafik 5.11. Rata-Rata Proporsi Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Keerom Tahun 2017**

■ Makanan ■ Bukan Makanan



Sumber: Hasil Olahan Susenas 2017

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. Kesimpulan

##### 6.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

- IPM Kabupaten Keerom Tahun 2017 sebesar 64,87 atau naik 0,62 poin jika dibandingkan capaian IPM tahun 2016.

##### 6.1.2 Indikator Kependudukan

- Tahun 2017 terjadi pertumbuhan penduduk sebesar 1,64 persen dibandingkan tahun 2016.
- Jumlah penduduk Kabupaten Keerom Tahun 2016 adalah sejumlah 55.018 jiwa, yang terdiri dari 29.483 jiwa penduduk laki-laki dan 25.535 jiwa penduduk perempuan.
- Jumlah rumah tangga di Kabupaten Keerom tahun 2016 adalah 13.085 rumah tangga dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga adalah 4 orang.
- Berdasarkan hasil penghitungan *Dependency Ratio*, secara rata-rata 100 orang penduduk usia produktif terdapat 45 orang penduduk usia tidak produktif.

### 6.1.3 Indikator Pendidikan

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Keerom secara umum dapat dikatakan memiliki capaian yang baik. Hal ini dapat dilihat dari :

- Secara total, APS Kabupaten Keerom tahun 2017 tertinggi berada pada kelompok usia SMP/Sederajat atau usia 13-15 tahun yaitu sebesar 95,27 persen dan yang terendah adalah pada kelompok usia SD/Sederajat atau 7-12 tahun yaitu 91,39 persen.
- Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk perempuan Kabupaten Keerom adalah 11,93 tahun dan HLS laki-laki adalah 11,85 tahun.
- Tingkat pendidikan penduduk 15 tahun ke atas pada umumnya telah menyelesaikan jenjang pendidikan SD atau jenjang di atasnya yaitu sebanyak 42,29 persen. Hal ini sejalan dengan gambaran rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Keerom sebesar 7,57 tahun yang berarti penduduk Kabupaten Keerom pada umumnya belum menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun atau jenjang SMP.

### 6.1.4 Indikator Ketenagakerjaan

- Kabupaten Keerom memiliki potensi angkatan kerja laki-laki lebih banyak dari pada angkatan kerja perempuan.
- Hampir 60 persen penduduk yang bekerja di Kabupaten Keerom bekerja di sektor pertanian.

#### 6.1.5 Indikator Kesehatan

- AM (Angka Morbiditas) Kabupaten Keerom Tahun 2017 adalah 19,81 persen atau sebanyak 10.606 penduduk Kabupaten Keerom mengalami keluhan kesehatan.
- Dari 14 kelompok umur, persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan terbanyak ada pada kelompok umur 0-4 tahun yaitu sebesar 10,13 persen.

#### 6.1.6 Indikator Konsumsi

Komposisi pengeluaran untuk non makanan sebesar 45,70 persen, sedangkan untuk makanan sebesar 54,30 persen.

#### 6.2. Saran

Pelaksanaan pembangunan sebaiknya dilaksanakan secara menyeluruh dan terintegrasi untuk meningkatkan capaian pembangunan manusia terutama terkait dengan peningkatan daya beli penduduk Kabupaten Keerom.

Adapun saran yang diberikan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Keerom berdasar temuan permasalahan adalah sebagai berikut :

- Untuk mengatasi persebaran penduduk yang tidak merata, pemerintah Kabupaten Keerom sebaiknya memprioritaskan pengembangan wilayah kota di daerah Arso Timur, Skanto dan Senggi maupun kampung yang berbatasan dengan distrik tersebut .

- Perlu adanya penambahan infrastruktur kesehatan dan pendidikan
- Untuk menghindari adanya putus sekolah, diharapkan peran pemerintah untuk dapat menekan biaya pendidikan.
- Perlu adanya optimalisasi program ekstrakurikuler maupun penanaman jiwa wirausaha sejak dini sehingga mereka siap terjun ke lapangan kerja.
- Memperluas kesempatan kerja dengan mengoptimalkan potensi Kabupaten Keerom untuk menarik investor, memberikan kredit lunak, dan menumbuhkan jiwa berwiraswasta dalam diri masyarakat.
- Mengaktifkan organisasi wanita dan posyandu sebagai sarana peningkatan kreativitas dan kemampuan ibu dalam menciptakan lapangan usaha serta dapat meningkatkan kualitas fisik ibu dan anak.

# **DATA**

**MENCERDASKAN BANGSA**



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN KEEROM**

**Jl. Poros Arso II, Arso, Keerom, 99468**

**Homepage : <http://keeromkab.bps.go.id>**